

**PENGARUH PROGRAM BANTUAN DESA
TERHADAP PARTISIPASI DAN SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN DATI II JENEPONTO**



Oleh

SYAMSUDDIN

Stb / Nirm : 4586'020207 / 871133245

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1990

A B S T R A K S I

SYAMSUDDIN Skripsi berjudul " Pengaruh Program Bantuan Desa Terhadap Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Binamu Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto ". Dengan Pembimbing I.

Dra. H. HASYAH HANENG, MPA dan Pembimbing II.

Drs. H.M. IDRUS NURDIN.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh Inpres Bantuan Desa terhadap Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang turut mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Binamu dan dapat pula mengetahui realisasi dan pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah Diskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan, sedangkan teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan observasi bertujuan untuk mengadakan tinjauan keadaan secara langsung kemudian membandingkan dengan hasil wawancara dan informasi dari responden.

Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh Inpres Bantuan Desa terhadap partisipasi melalui swadaya masyarakat sudah nampak pada tabel 9, sebab modal utama masyarakat desa untuk berpartisipasi ialah swadaya dan gotong royong.

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENGARUH PROGRAM BANTUAN DESA TERHADAP
PARTISIPASI DAN SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN DAIYU JENEPONTO**

Nama Mahasiswa : S Y A M S U D D I N


Nomor STB/NIRM : 4536020207/871133245

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

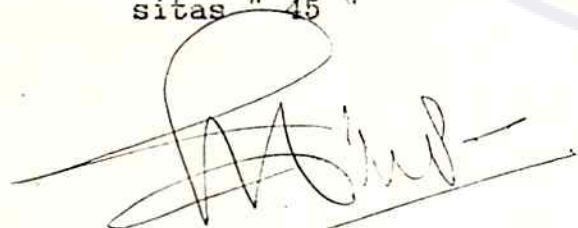

(Dra. H. HASYAH HANENG, MPA)

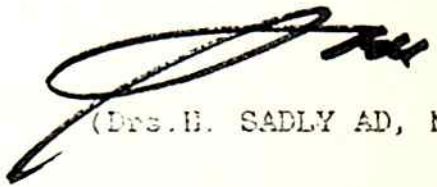

(Drs. H. M. IDRUS NURDIN)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Univer-
sitas "45"

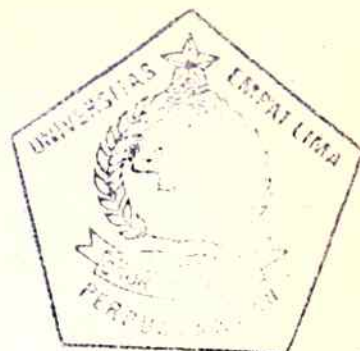
Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu -
Politik.


(Drs. H. MUHAMMAD THALA)


(Drs. H. SADLY AD, MPA)

Tanggal Pengesahan

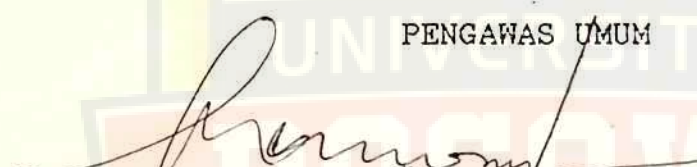
HALAMAN PENERIMAAN

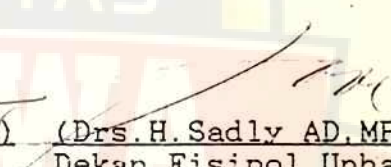


Pada hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 1991
Skripsi atas nama : S Y A M S U D D I N
Nomor Stambuk/NIRM : 4586020207/871133245

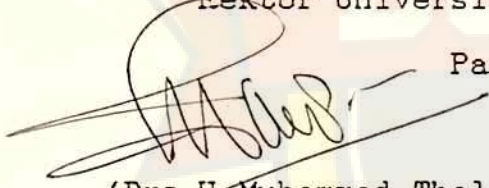
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana Negara pada jurusan Ilmu
Administrasi Negara.

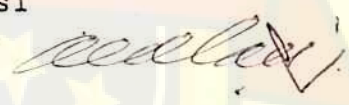
PENGAWAS UMUM



(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)
Rektor Universitas " 45 "


(Drs. H. Sadly AD, MPA)
Dekan Fisipol Unhas



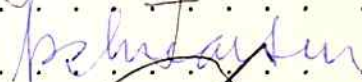
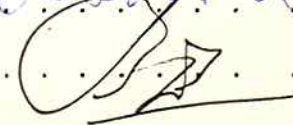
Panitia Ujian Skripsi


(Drs. H. Muhammad Thala)
K e t u a


(Drs. Guntur Karnaeni)
Sekretaris


(Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah)
A n g g o t a

T I M P E N G U J I

- 1. Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah ()
- 2. Dra. H. Hasyah Haneng, MPA ()
- 3. Drs. H. P. S. Rahim ()
- 4. Drs. H. Misbahuddin Ahmad, MS ()

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan dan rahmatnyalah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan karya ilmiah ini sebagai tugas terakhir untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 45 dengan judul " Pengaruh Program Bantuan Desa Terhadap Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Binamu Kabupaten Dati II Jeneponto ".

Dalam rangka penyusunan Skripsi, penulis berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan dengan baik, namun demikian penulis menyadari sedalamnya bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan yang tentunya banyak menimbulkan kekurangan-kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi pembahasannya. Olehnya itu dalam mendekati kesempurnaan skripsi ini mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun.

Oleh sebab itu, dengan hati yang lapang penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid, selaku Rektor Universitas "45".

2. Bapak Drs. H. Muhammad Thala, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
3. Bapak Drs.H.Sadly AD,MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
4. Ibu Dra.H.Hasyah Haneng,MPA, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.H.Idrus Nurdin, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penulisan ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan juga Staf Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu kelancaran kuliah penulis.
6. Bapak Jahini SH selaku Kepala Wilayah Kecamatan Binamu Kepala Kelurahan Empoang, Kepala Desa Bontomate'ne dan Kepala Desa Mangepong atas kesediannya menerima penulis dan pelayanan serta pemberian bahan penjelasan serta data yang diperlukan.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, memberi pengorbanan sejak masih kecil sampai sekarang dan senantiasa mencurahkan perhatiannya serta doa selalu mengiringi anakda dalam mencapai cita-citanya.
8. Kepada semua kakanda yang tercinta yang senantiasa memberikan dorongan dan pengorbanan baik moril maupun materil.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis kiranya mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH SWT, atas kebaikannya. Insya Allah.

Akhirnya karya ilmiah ini penulis peruntukkan kepada seluruh pembaca yang budiman.

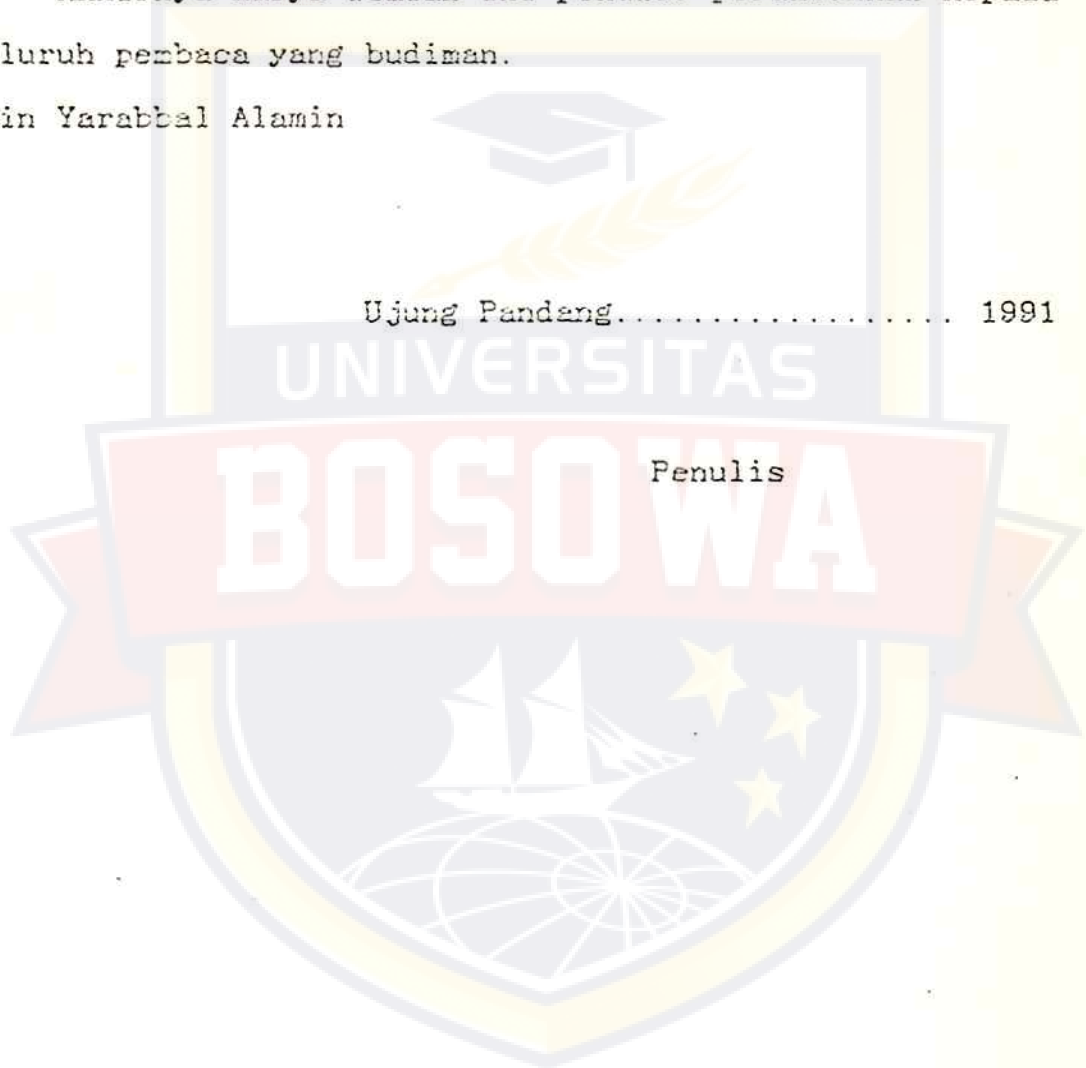
Amin Yarabba Alamin

Ujung Pandang..... 1991

UNIVERSITAS

BOSO WA

Penulis



DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| Abstraksi..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halama Penerimaan | iv |
| Kata Pengantar..... | v |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Tabel | vii |
| Daftar lampiran | viii |
| Bab I. Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Metodologi Penelitian | 6 |
| E. Sistimatika Penulisan | 9 |
| Bab II. Tinjauan Kepustakaan..... | 11 |
| A. Progam Bantuan Desa | 11 |
| B. Pembangunan | 13 |
| C. Desa | 16 |
| D. Pembangunan Desa | 18 |
| E. Partisipasi Masyarakat | 21 |
| Bab III. Deskriptif Wilayah Kecamatan Binamu Dalam Penerapan Bantuan Desa Dalam Pembangunan.. | 30 |

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Binamu | 30 |
| 1. Keadaan Geografis | 30 |
| 2. Keadaan Demografis..... | 32 |
| B. Sturuktur Organisasi dan Tata kerja sekretariat Wilayah Kecamatan Binamu.. | 50 |
| Bab IV. Analisa Pengaruh Program Bantuan Desa terhadap partisipasi dan swadaya masyarakat dalam Pembangunan | 51 |
| A. Pengaruh Program Bantuan Desa terhadap partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangynan | 51 |
| B. Beberapa faktor yang berpengaruh adanya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa..... | 62 |
| C. Realisasi Program Bantuan Pembangunan Desa di Wialayah Kecamatan Binamu..... | 77 |
| Bab V : Penutup. | |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saaran-saran..... | 82 |
| Daftar Pustaka..... | 84 |
| Dokumen-dokumen..... | 85 |

DAFTAR TABEL

- TABEL I : Luas Wilayah diperinci menurut jumlah Desa dan Kelurahan. Hal. 30
- TABEL II : Jumlah Penduduk diperinci menurut Desa/Kelurahan, Kewarganegaraan dan jenis kelamin. Hal. 33.
- TABEL III : Jumlah Penduduk diperinci menurut Desa/Kelurahan, luas dan kepadatan. Hal. 34.
- TABEL IV : Struktur Penduduk diperinci menurut Kelompok umur dan jenis kelamin. Hal. 36.
- TABEL V : Jumlah Sekolah diperinci menurut Desa dan Kelurahan, murid, guru, dan jenis kelamin. Hal. 40
- TABEL VI : Jumlah akseptor KB dan alat Kontrasepsi yang digunakan tahun 1990/1991. Hal. 44
- TABEL VII : Prasarana dan sarana Ibadah di Wilayah Kecamatan Binamu. Hal. 45
- TABEL VIII: Jumlah Penduduk Kecamatan Binamu menurut Agama Hal. 46
- TABEL IX : Penggunaan Program Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Binamu tahun 1985/1986-1990/1991 Hal. 53
- TABEL X : Tanggapan Responden terhadap pengaruh Bantuan Desa dalam berpartisipasi, dalam pembangyan Desa. Hal. 60

TABEL XI : Penggunaan Bantuan Peningkatan Peran serta Masyarakat (BP2M). Hal. 66

TABEL XII: Tanggapan Responden terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam memainkan Peranan Dalam Pembangunan Desa Hal. 72

TABEL XIII: Tanggapan Responden terhadap sikap Ketertutupan Kepala Desa kepada masyarakat dalam penerimaan Keuangan Bantuan Desa. Hal. 75



B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat strategis, bukan saja karena sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di desa, akan tetapi jauh dari pada itu adalah karena sebagian besar masyarakat yang berdiam di pedesaan itu masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Menyadari hal tersebut, maka Pemerintah menetapkan bahwa desa merupakan sasaran pokok dari pembangunan nasional dalam rangka usaha mewujudkan trilogi pembangunan bangsa yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Ketetapan MPR Nomor II tahun 1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menunjukkan bahwa dalam rangka meratakan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah pedesaan yang lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi adanya pengangguran, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan serta peningkatan kemampuan masyarakat

untuk pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam dan menanggulangi masalah sumber-sumber yang mendesak.

Dalam hubungan ini berbagai usaha kebijaksanaan dan program pembangunan sektoral maupun yang berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) terus dilanjutkan, dan setiap tahunnya semakin meningkat jumlahnya dan pelaksanaannya terus disempurnakan.

Program-program Pemerintah khususnya yang diarahkan pada masyarakat di daerah pedesaan, pada umumnya ditujukan pada perbaikan taraf hidup masyarakat, baik pendapatan, lapangan kerja dan tingkat kesehatan. Kenyataan menunjukkan bahwa keadaan masyarakat yang hidup di daerah pedesaan bersikap hanya menerima apa adanya. Kehidupan mereka sebagaimana yang dialami adalah kehendak dari pada keadaan, keadaanlah yang menentukan segalanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha pembangunan dan pemerataan ke pelosok tanah air, Pemerintah telah memberikan bantuan keuangan kepada setiap desa yang dimulai sejak Pelita I tahun 1969/1970 yang pada kenyataannya dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Perhatian dan upaya pemerintah terhadap kebijaksanaan yang semakin meningkat ini adalah dimaksudkan untuk menggerakkan potensi gotong royong masyarakat desa di dalam pembangunan desa sekaligus untuk merangsang swadaya masyarakat desa di dalam membangun desanya masing-masing.

Sesuai dengan pernyataan di atas, maka penulis akan menyoroti keterlibatan masyarakat dalam menerima, melaksanakan serta memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian apa yang diprogramkan pemerintah desa melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desanya dapat tercapai.

Sejalan dengan hal-hal yang penulis kemukakan di atas penulis merasa terdorong untuk memilih topik tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan hasil karya dengan judul "PENGARUH PROGRAM BANTUAN DESA TERHADAP PARTISIPASI DAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN DATI II JENEPONTO".

Adapun yang melatar belakangi sehingga penulis memilih judul tersebut di atas antara lain :

1. Bahwa pembangunan di Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Dati II Jeneponto masih memerlukan adanya perhatian dan penanganan yang serius baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kegiatan pembangunan dimasa mendatang perlu lebih memperluas dan memperbesar keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan swadaya yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari pada masyarakat itu sendiri.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Binamu yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Dati II Jeneponto dengan

seluruh wilayah kerjanya meliputi Desa dan Kelurahan, sosial ekonomi masyarakat desanya masih rendah serta tingkat pendidikan rata-rata masih rendah pula. Disamping pengaruh adat istiadat/kebiasaan masyarakatnya masih sangat kuat, sehingga keadaan yang demikian ini merupakan faktor penghambat di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan tingkat perkembangan desa dari Desa Swadaya, Desa Swakarya, ke Desa Swasembada dan menuju kepada Desa Pancasila.

Bertitik tolak dari pelaksanaan Pembangunan Desa melalui Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Desa di daerah ini dapat memberi arti serta pengaruh di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

B. Perumusan Masalah.

Pemberian Bantuan Desa dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah berupa Inpres pada umumnya telah membawa hasil dalam pelaksanaan bentuk fisik. Namun demikian seberapa jauh hasil fisik tersebut membawa pengaruh terhadap partisipasi masyarakat setempat dalam keterlibatannya melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha pembangunan desa sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Inpres itu sendiri. Sebab kualitas dari pada keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang berhasil ditumbuhkan melalui proses pembangunan.

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis mencoba untuk mengamati secara langsung pengaruh yang ditimbulkan oleh Bantuan Pembangunan Desa terhadap kegiatan dan usaha-usaha pembangunan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui swadaya gotong royong masyarakat desa itu sendiri.

Untuk memperjelas uraian selanjutnya, penulis akan membatasi diri pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Program Bantuan Desa terhadap partisipasi dan swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan Binamu ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang turut mempengaruhi adanya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa ?
3. Bagaimana realisasi Program Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Binamu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Program Bantuan Desa terhadap Partisipasi dan Swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan Binamu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang turut mempengaruhi adanya Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa.

3. Untuk mengetahui bagaimana realisasi Program Bantuan. Pembangunan Desa di Kecamatan Binamu.

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Desa dan Kelurahan didalam penentuan strategi, menetapkan dan melaksanakan suatu program pembangunan khusus terhadap Program Pembangunan di Pedesaan.

D. Metode Penelitian

1. Metode

Seperti biasanya dalam penulisan suatu karya ilmiah terlebih dahulu ditentukan metode penelitian yang digunakan, maka dalam tulisan ini pula menggunakan suatu metode penelitian agar dalam melaksanakan penelitian tidak mengalami kesukaran. Selain itu dimaksudkan supaya data dan informasi yang diperoleh tidak menyimpang dari pokok bahasan. Metode yang digunakan disini adalah Metode Deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Pengaruh Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Dati II Jeneponto.

2. Populasi dan Sampel.

a. Populasi : populasi dalam penelitian ini meliputi 9 Desa/Kelurahan pada Wilayah Kecamatan

Binamu yang menerima Bantuan Desa, masing-masing:

1. Kelurahan Empoang
2. Kelurahan Pabiringa
3. Kelurahan Balang
4. Desa Bontomate'ne
5. Desa Kayu Loe
6. Desa Paitana
7. Desa Mangepong
8. Desa Sapanang
9. Desa Bululoe

b. Sampel : Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi sampel satu (1) Kelurahan (2) Desa, masing-masing Kelurahan Empoang sebagai Desa yang sudah maju atau Desa Swasembada, sedangkan Desa Bontomate'ne sebagai Desa sedang berkembang atau Desa swakarya dan Desa Mangepong sebagai Desa terbelakang.

Adapun responden yang ingin penulis wawancarai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Bades Kabupaten
Dati II Jenepono : 1 Orang
2. Aparat Kecamatan
 - Camat dan Sekwilcam : 2 Orang
 - Urusan Pembangunan Desa : 2 Orang

3. Aparat Desa

- Kepala Desa dan Sekdes : 6 Orang
- Pengurus LKMD : 15 Orang

4. Tokoh Masyarakat terdiri dari

- Tokoh Adat : 6 Orang
- Tokoh Agama : 6 Orang
- Tokoh Cendekiawan : 6 Orang
- Anggota Masyarakat : 6 Orang

Jumlah responden adalah :

- Aparat Pemerintah : 26 Orang
- Tokoh-Tokoh Masyarakat : 24 Orang

Jumlah : 50 Orang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara dan Interview ;

Dalam teknik wawancara ini penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak - pihak yang berkepentingan yang antara lain adalah Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat.

b. Teknik Observasi ;

Dalam teknik ini penulis mengadakan tinjauan keadaan secara langsung kemudian membandingkan-nya dengan hasil wawancara dan informasi dari responden.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab Pertama : Sebagai bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan

masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab Kedua : Tinjauan Pustaka; tentang Program Bantuan Desa dan dapat ditinjau dari beberapa pengertian seperti : Pembangunan, Desa, Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat.

Bab Ketiga : Deskriptif Wilayah Kecamatan Binamu dalam penerapan bantuan desa dalam pembangunan desa; menguraikan tentang Gambaran umum Wilayah Kecamatan Binamu, baik itu dilihat dari segi Geografis dan Demografis. Dan dapat pula dilihat dari pada Struktur Organisasi Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Binamu.

Bab Keempat : Analisa Pengaruh Program Bantuan Desa terhadap partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan yang meliputi Pengaruh Program Bantuan Desa serta

faktor-faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan bantuan desa dan dapat ditinjau dari segi pengawasan.

Bab Kelima : Merupakan bab penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.



B A B II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bertitik tolak dari pasal 9 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984, disebutkan bahwa Bantuan Pembangunan Desa adalah bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan usaha swadaya gotong royong masyarakat desa dalam membangun proyek-proyek yang diprioritaskan oleh masyarakat desa dan untuk menunjang kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

A. Program Bantuan Desa.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah untuk membangkitkan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan adalah melalui Bantuan Desa (Bandes).

Istilah Bantuan Desa (Bandes) sejak awal program ini dicanangkan oleh pemerintah hanya dikenal dengan sebutan 'Subsidi Desa'.

Dalam Keputusan Pemerintah Nomor 16 tahun 1969 pasal 2 tentang bantuan berupa subsidi Desa dikatakan bahwa subsidi adalah tunjangan uang tersebut kepada suatu yayasan perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).

Jadi kalau dilihat artian Bantuan Desa atau Subsidi Desa sesuai dengan keputusan tersebut adalah bantuan atau tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap

desa dan Kelurahan sebagai rangsangan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan kata lain bahwa bantuan desa adalah bantuan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada setiap desa dan kelurahan yang berupa uang sebagai alat untuk menggugah, mendorong dan merangsang usaha swadaya gotong royong masyarakat untuk meningkatkan dan memperlancar usaha-usaha pembangunan desa dan kelurahan demi tercapainya tujuan pembangunan desa dan sekaligus dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Nasional.

Selanjutnya Program Bantuan Pembangunan Desa dalam "Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Desa" tahun 1990-91 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 tujuan untuk :

- a. Mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong serta dapat menumbuhkan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. Mengusahakan semua lembaga yang ada di desa seperti LMD (Lembaga Musyawarah Desa), LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- c. Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan lumbung Desa/Perkreditan Desa dengan mendorong swadaya gotong royong masyarakat untuk menanggulangi kerawanan pangan dan menunjang upaya pencapaian swasembada pangan serta mengatasi kelangkaan permodalan di desa.

- d. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha ekonomi di pedesaan kearah kehidupan berkoperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan agar mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, melalui latihan-latihan keterampilan bagi masyarakat pedesaan untuk memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil produksinya yang sekaligus diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja di pedesaan.

Dengan demikian nampak bahwa antara Inpres bantuan Pembangunan Desa di satu pihak dan partisipasi masyarakat dilain pihak adalah sebagai indikator menentukan strategi dalam pencapaian sasaran pembangunan di pedesaan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka diprogramkanlah Inpres Bantuan Pembangunan Desa dengan harapan dapat merangsang partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk memanfaatkan Bantuan Pembangunan Desa secara optimal agar mencapai hasil yang nyata dalam pembangunan desa dan kelurahan, maka tergantung kepada bagaimana motivasi yang digunakan sehingga dapat merangsang peran serta secara aktif dalam pembangunan dan menumbuhkan prakarsa, swadaya dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri.

B. Pembangunan.

Untuk mengarahkan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan, baiklah berikut ini akan

dikemukakan beberapa definisi mengenai pembangunan.

Sebagaimana disebutkan oleh SP. SIAGIAN dalam bukunya "Administrasi Pembangunan" mengatakan sebagai berikut :

"Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building".
(Siagian, 1981 : 2-3)

Dari pengertian tersebut di atas akan nampak terlebih adanya beberapa unsur terpenting atau ide pokok bagi pembangunan yaitu :

- a. Pembangunan harus merupakan suatu proses yang secara terus menerus dilaksanakan;
- b. Pembangunan harus dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat;
- c. Pembangunan harus dilaksanakan secara berencana dan berorientasi kepada perubahan dan pertumbuhan;
- d. Pembangunan harus mengarah kepada cara hidup yang lebih baik daripada sebelumnya;
- e. Perubahan yang dicapai melalui pembangunan harus mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama yang meliputi politik, sosial budaya dan administrasi.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamijoyo dalam bukunya "Pengantar Administrasi Pembangunan" mengatakan bahwa : "Pembangunan itu adalah

upaya yang dilakukan secara sadar untuk merubah suatu keadaan kepada keadaan baru yang dipandang lebih baik". (Bintoro, 1985:13).

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa pembangunan adalah merupakan proses yang dilakukan secara sadar untuk menuju kepada keadaan yang baru dan lebih baik dari yang sebelumnya.

Sehubungan dengan itu pula J. Turung dalam bukunya "Administrasi Pembangunan" merumuskan defenisi pembangunan sebagai berikut : "Pembangunan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan dari keadaan dan kondisi apa adanya kekeadaan kondisi apa dan bagaimana seharusnya". (Turung, 1980, hal 3).

Kalau pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan dan perkembangan yang berarti kondisi yang muncul dalam suatu bangsa dan negara akan lebih meningkat sesuai yang diinginkan oleh pemerintah sebagaimana yang seharusnya.

Jika dikaji defenisi tersebut lebih jauh, maka berarti pembangunan itu adalah suatu rangkaian usaha/proses pertumbuhan dan perobahan atau perkembangan yang berencana dari keadaan dan kondisi apa adanya keadaan kondisi apa dan bagaimana seharusnya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah bersama masyarakat menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.



Modernisasi disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.

Dengan memperhatikan ketiga ciri khas arti pembangunan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap pembangunan dalam arti luas selalu terkandung proses pembaharuan, pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta peralihan dan berkesinambungan. Sedangkan dalam arti sempit terkandung salah satu dari ketiga ciri khas tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan tidak boleh dilaksanakan dengan sikap masa bodoh atau acuh tak acuh akan tetapi pembangunan itu adalah kewajiban yang menuntut perhatian sepenuhnya. Disuatu pihak menyerahkan pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah adalah suatu hal yang keliru. Namun yang idealnya adalah partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat yang sangat diharapkan, walaupun diakui bahwa peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan sangat penting dan menentu.

C. D e s a.

Perkataan Desa sama artinya dengan Negeri atau nagari yang berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti tanah air tanah asal atau tanah kelahiran. Dengan

demikian Desa mempunyai suatu sistim yang berdiri sendiri yang terdiri dari komponen-komponen atau sub-sub sistim karena adanya kelompok masyarakat.

Berbagai ahli telah memberikan pengertian tentang desa, namun secara redaksional terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada defenisi sebagai berikut :

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Bintoro adalah "Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungannya dengan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain". (Bintoro, 1969:95).

Sedangkan menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo mengatakan bahwa "Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal satu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri". (Soetarjo, 1979 :)

Kalau dilihat kedua pandangan yang dikemukakan diatas, adalah merupakan suatu tinjauan dari pandangan geografi dan pandangan sosiologi yang membentuk suatu pemerintahan sendiri yang berdasarkan kesatuan hukum. Hal tersebut berlainan dengan pengertian ketatanegaraan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Untuk kepentingan penulis skripsi ini maka perlu dikemukakan pengertian 'Desa' dan 'Kelurahan' karena mempunyai kaitan erat dalam penguraian lebih lanjut serta lebih menyegarkan kembali tentang arti dari desa dan kelurahan itu sendiri.

Didalam pasal 1 huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 menyatakan bahwa Desa dan Kelurahan mempunyai arti yang berbeda, adapun pengertian dibawah ini adalah :

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Sedangkan pengertian Desa dan Kelurahan pada hakekatnya adalah sama, hanya saja perbedaannya terletak pada hak penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Ini hanya dimungkinkan bagi Desa sedangkan untuk Kelurahan tidak diberi hak untuk itu.

D. Pembangunan Desa.

Berpangkal pada beberapa pengertian serta penelitian terhadap aspek-aspek riil desa, maka timbullah sejumlah batasan tentang pembangunan desa. Sebagai salah satu pengertian terdapat dalam Brosur Pokok-Pokok Pembangunan Desa yang diterbitkan oleh Dirjen Pembangunan masyarakat Desa pada tahun 1974.

"Pembangunan Desa adalah Usaha Pembangunan masyarakat pada Unit Pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistimatis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh".

Dengan melihat defenisi tersebut, jelaslah bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara menyeluruh di tanah air tanpa pengecualian dimanapun letaknya. Pembangunan tersebut memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yang bersangkutan karena pada dasarnya pembangunan itu adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah disuatu pihak dan masyarakat seluruhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa istilah Pembangunan Desa telah diperkenalkan sejak pelita I tahun 1969/1970 - 1973/1974 yang diatur dalam Keputusan Presiden nomor 319 tahun 1968 dengan istilah ini dimaksudkan agar pembangunan desa tidak hanya meliputi aspek masyarakat desa (Community) melainkan juga meliputi aspek fisik dan pemerintahannya. Atas dasar istilah inilah sehingga dewasa ini tidak lagi menggunakan istilah Pembangunan Masyarakat Desa melainkan Pembangunan Desa yang diidentikkan dengan istilah Community Development.

Namun pada kenyataannya masih sering kali terdapat istilah seperti itu sehingga sulit untuk membedakan istilah Pembangunan Desa dengan Pembangunan Masyarakat Desa.

Dari defenisi Drs A. Surjadi dalam bukunya 'Pembangunan Masyarakat Desa' mengatakan bahwa :

"Pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengajarkan bersama untuk menemukan keinginan mereka tersebut".
(Surjadi 1989 : 1).

Defenisi yang dikemukakan diatas menunjukkan betapa perlunya suatu proses perencanaan desa untuk menentukan program pembangunan desa itu sendiri.

Untuk menciptakan adanya pola pikir dalam rangka perwujudan gerak kepada pelaksanaan pembangunan pedesaan maka dalam Keputusan Presiden nomor 21 tahun 1984 tentang rancangan Pembangunan Lima Tahun Bab 26 digariskan pula tentang pembangunan desa yang diharapkan akan menjadi pola pandang dalam sistem pengkajian untuk menetapkan suatu pola pengelolaan terhadap pembangunan desa.

Dalam keputusan presiden tersebut dinyatakan bahwa pembangunan desa adalah : "Seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung dipedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong".

Pembangunan memahami arti dan makna pembangunan desa yang demikian itu, maka pembangunan desa/kelurahan dapat terarah secara dinamis dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya guna menuju kepada tujuan yang telah digariskan.

Pembangunan desa/kelurahan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu ia mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat di desa yang terdiri dari berbagai program yang saling terkait dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dengan aparat didaerah, sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pelaksanaan asas demokrasi.

E. Partisipasi Masyarakat.

Keberhasilan pembangunan dewasa ini banyak ditentukan oleh adanya partisipasi dari seluruh komponen yang terlibat dalam usaha tersebut. Namun dalam hal ini yang menjadi sorotan utama adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya mengenai partisipasi ada beberapa sarjana yang menafsirkan sesuai dengan sudut pandangannya masing-masing :

Dalam hal ini Alber Wijaya mengemukakan sebagai berikut : Bahwa partisipasi masyarakat mempunyai beberapa ciri yaitu :

"1. Menurut tujuannya

- a. Dalam hal ini partisipasi demikian berupa mobilitas yang bertujuan hanya mendukung apa yang telah ditetapkan dari atas. Dikatakan bahwa bila kebijaksanaan dari atas (pimpinan kurang sempurna atau membawa keruntuhan, maka semua dimobilisasi juga akan runtuh)

- b. Partisipasi ini dapat pula berupa saling menunjang. Dalam hal ini partisipasi mengandung tidak hanya dukungan tetapi juga koreksi dan pengisian kekurangan. Koreksi dan kontrol perlu dilakukan sebelum sempurna tetap stabil.

2. Menurut frekwensinya

- a. Partisipasi demikian dapat dilakukan sekali-kali saja seperti proses terhadap kenaikan yuran listrik pada beberapa tahun yang lalu. Dijelaskan bahwa partisipasi yang terjadi semacam ini akan merusak sistem bilamana pencetusannya disebabkan kekecewaannya yang sudah lama terhadap anggota masyarakat.
- b. Partisipasi dapat pula terus-menerus (kontinyu) secara priodik. Pembawaan partisipasi yang tertib, berdasarkan konstruktif, walaupun sangat kritis akan menambah kestabilan masyarakat karena rakyat melihat bahwa pengontrolan kepada pemerintah tetap ada dan diberi tempat.

3. Menurut langsung tidaknya.

- a. Partisipasi secara langsung dilakukan sendiri oleh orang-orang yang berkepentingan bertemu dengan pimpinan organisasi yang hendak di kontrol. Dialog biasanya lebih langsung mengenai sasarannya dimana para partisipan mengungkapkan isi hatinya.
- b. Partisipasi secara tidak langsung
Dalam pola ini terdapat dua hal :
 1. Orang yang berkepentingan membina suatu kelompok lain, lalu kelompok tersebut yang mengungkapkan isi hatinya untuk berpartisipasi di masyarakat. Lazimnya partisipasi ini disebut penungangan.
 2. Melalui orang-orang atau kelompok tertentu mengungkap permasalahan lalu kelompok yang lebih menghasilkan saran-saran yang timbul dari kelompok tadi diuji untuk mendapatkan suatu bentuk-bentuk partisipasi yang matang. Hal ini biasanya kita dapat melihat/mendengar Tivi, surat kabar, radio yang menyatakan partisipasi masyarakat

melalui kelompok-kelompok tentang dukungannya atas pencalonan dan pengangkatan bapak Jenderal Purnawirawan Suharto menjadi Presiden.

4. Menurut kelembagaan

a. Partisipasi dapat berupa perorangan.

Partisipasi tersebut kurang efektif karena masalah yang diungkapkan masih bersifat mentah atau sempit ruang lingkupnya. Hal ini menyukarkan pemerintah untuk menampung semua partisipasi yang terserat. Memang pada kenyataannya bahwa partisipasi perorangan yang kadang-kadang didorong kehendak pribadi yang belum dapat dijamin kepastiannya.

b. Partisipasi massa.

Dalam hal ini massa/rakyat digerakkan baik untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah (mobilisasi) kegiatan semacam ini dalam rangka pelaksanaan pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun yang timbul atas dasar swadaya masyarakat itu sendiri.

c. Partisipasi teratur melalui lembaga-lembaga menengah yang merupakan suara/wakil dari berbagai golongan rakyat.

Partisipasi semacam ini telah dilaksanakan".
(Wijaya, 1967 : 10)

Namun demikian pada umumnya Lembaga-lembaga yang ada merupakan wadah kesatuan masyarakat masih menunggu instruksi dari atas atau pimpinan. Akan tetapi Lembaga-lembaga tumbuh di masyarakat, keikutsertaan dan penerimaannya terhadap pemerintah dengan mudah dibina.

Pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh Alber Wijaya mengandung 2 makna yaitu :

a. Partisipasi yang sesungguhnya timbul dari masyarakat

secara positif dalam menunjang upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

- b. Partisipasi yang seakan-akan dipaksa oleh pihak penguasa agar apa yang diprogramkan benar-benar masyarakat harus menurut atau mengikutinya.

Dan kalau ini dipertahankan bukan berarti partisipasi kebebasan akan tetapi mengalami kerusakan, mengapa demikian ? Oleh karena apabila hal yang diprogramkan merupakan keuntungan sepihak maka hasilnya pun hanya untuk kepentingan sepihak dan merupakan tantangan pemerintah Orde Baru. Terdengar slogan yang didengung-dengungkan bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya materil dan spritual.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari kita dapat melihat keikutsertaannya dalam menerima dan melaksanakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, dan dapat pula kita melihat bagaimana memelihara hasil-hasil pembangunan telah berhasil memenuhi seluruh kepentingan masyarakat, apakah dapat terpelihara dengan baik dan dapatkah memperbaikinya bila pembangunan proyek tersebut mengalami kerusakan. Dan dapat pula kita melihat bagaimanakah merencanakan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan di desanya masing-masing.

Kesemuanya itu dapat dikatakan keterlibatan masyarakat atau partisipasi. Kemudian oleh Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan bahwa :



"Dalam pelaksanaan kebijaksanaan program-program pembangunan yang konsisten dapat bersistem prioritas sementara memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam arti menunjang akan keberhasilan sehingga program tidak akan berlalu begitu akan tetapi mempunyai dampak positif". (Tjokroamidjojo, 1986:206).

Partisipasi masyarakat dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan nasional yakni ada tiga hal menurut Bintoro :

1. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Keterlibatan aktif atau partisipasi dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Keterlibatan aktif atau partisipasi dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan secara berkeadilan.

(Bintoro, 1986 : 207).

Dari pernyataan diatas maka nampak betapa besar manfaat dan peranan keterlibatan masyarakat dalam hal mengisi kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa :

"Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan dinamis".

Pembangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Demikian halnya pada daerah pedesaan utamanya di wilayah Kecamatan Binamu, keikutsertaan masyarakat nampak dalam upaya pelaksanaan kegiatan kerja baik program yang ditentukan oleh pemerintah maupun yang ditimbulkan oleh swadaya gotong royong masyarakat itu sendiri.

Kenyataan ini terlihat pada proyek-proyek yang dananya sangat minim berbeda halnya dengan proyek besar seperti misalnya pembangunan sekolah tingkat atas (SMA) jelas keterlibatan masyarakat tidak didapati secara sukarela melainkan harus mendapat upah atau bayaran.

Diberbagai daerah pedesaan di Indonesia sering terdengar anjuran pemerintah melalui aparatnya ditingkat kecamatan sampai ke desa, agar semua aktifitas kegiatan pelaksanaan program pembangunan diupayakan melibatkan seluruh kekuatan (potensi) yang ada baik potensi manusiawi maupun potensi ilmiah.

Dan untuk menggerakkan hal tersebut dituntut kapasitas seorang dinamisator agar masyarakat tahu dan mengerti apa yang disampaikan. Pada umumnya didaerah pedesaan ada dua hal yang harus dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan yakni :

- a. Kemampuan menggerakkan masyarakat dalam menunjang pembangunan fisik.
- b. Kemampuan menggerakkan atau merubah sikap apatis dan passif masyarakat dalam mengenal dirinya dari keadaan yang lama menjadi baru dalam arti perubahan mental dan spritual.

Kegiatan-kegiatan dimaksud memerlukan atau membutuhkan keterlibatan masyarakat, mengapa demikian ? Oleh karena bagaimanapun juga halnya upaya pemerintah dalam memperbaiki taraf hidupnya, namun kalau masyarakat tidak menerima upaya yang dilakukan tidak akan berhasil.

Keberhasilan suatu usaha akan tercapai apabila kedua belah pihak saling menjalin hubungan yang serasi dan dilakukan secara kontinyu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, dimana pada umumnya masyarakat yang tinggal dipedesaan tingkat pendidikannya yang sangat rendah, namun pada dasarnya masyarakat lebih mengerti dan menerima dan giat melaksanakan proyek tanpa imbalan jasa (sukarela) apalagi kalau mendapat imbalan bayaran walaupun tidak penuh.

Ditingkat desa peranan Kepala Desa sangat menentukan keterlibatan seluruh masyarakat dalam hal menentukan alternatif prioritas program pembangunan, oleh karena dengan cara demikian dapat dirumuskan pilihan-pilihan yang akan dilaksanakan.

Seorang pemimpin sedapat mungkin mengetahui ukuran-ukuran dalam penentuan pilihan dari berbagai kebutuhan yang ada, dengan jalan membuat daftar ranking dengan maksud sebagai berikut :

1. Mempermudah tercapainya tujuan;
2. Memberikan kepuasan yang paling besar
3. Meningkatkan produktifitas
4. Meningkatkan efesiensi
5. Mempercepat pembangunan kapasitas orang-orang.

Kesemuanya ini dapat terlaksana dengan jalan pendekatan yang akurat terhadap masyarakat dan bahan-bahan yang akan disampaikan dengan menggunakan bahasa mudah dimengerti dan dihayati sehingga dengan demikian masyarakat merasa berkepentingan.

Perasaan ikut memilih perlu ditanamkan pada jiwa seluruh masyarakat, agar dengan sendirinya aktifitas dalam pembangunan desa dapat digerakkan.

Menurut Koentjaraningrat bahwa partisipasi masyarakat terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan masyarakat dan tipe yang pada prinsipnya berbeda yakni :

- "1. Partisipasi dalam aktifitas-aktifitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus;
2. Partisipasi masyarakat sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan".
(Koentjaraningrat, 1974 : 79)

Melihat tipe yang dikemukakan diatas, maka partisipasi masyarakat mempunyai perbedaan dari segi

kepentingan, atau kegunaan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kemudian yang disebutkan diatas, bahwa masyarakat nampak ikut berpartisipasi apabila mendapat tekanan dari pimpinan (Kepala Desa). Masyarakat dituntut dalam pelaksanaan proyek itu, dimana kepala desa oleh pimpinan (Camat) menuntut agar pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan.

Andaikan rantai komando dari camat kemudian kekepala desa yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban dalam era pembangunan dewasa ini.

Pembangunan membutuhkan pengorbanan dari seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah maupun swasta dalam bentuk pemikiran, dan moral, selanjutnya pada setiap partisipasi kedua ditekankan adanya aktifitas individu dalam pembangunan. Penekanannya pada pribadi-pribadi anggota masyarakat dalam menerima dan melaksanakan pembangunan dewasa ini.

Partisipasi masyarakat demikian pada umumnya lebih berhasil karena didukung oleh kesadaran guna kepentingan diri sendiri, keluarga, desa dan bangsa.

BAB III

DESKRIPTIF WILAYAH KECAMATAN BINAMU DALAM
PENERAPAN BANTUAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Gambaran umum Wilayah Kecamatan Binamu.

1. Keadaan Geografis

a. Luas dan Batas Wilayah.

Wilayah Kecamatan Binamu yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto adalah salah satu dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto dengan wilayahnya 127,04 Km² yang terlihat dalam tabel.

TABEL I

Luas Wilayah di perinci menurut
Jumlah Desa dan Kelurahan

| No | Desa/Kelurahan | Luas Wilayah |
|----|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kelurahan Empoang | 31,74 Km ² |
| 2 | Kelurahan Pabiringa | 19,56 Km ² |
| 3 | Kelurahan Balang | 11,61 Km ² |
| 4 | Desa Bontomate'ne | 8,64 Km ² |
| 5 | Desa Kayu Loe | 10,45 Km ² |
| 6 | Desa Paintana | 11,24 Km ² |
| 7 | Desa Mangepong | 15 Km ² |
| 8 | Desa Sapanang | 10,73 Km ² |
| 9 | Desa Bulu Loe | 8,08 Km ² |
| | Jumlah | 127,04 Km ² |

Sumber data : Kantor Bandes Kabupaten Jeneponto
tahun 1990

Wilayah Kecamatan Binamu terletak pada bagian Tengah dari Kabupaten Daerah tingkat II Jeneponto yang mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Batang.
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kelara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Bangkala.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan laut

b. Iklim.

Wilayah Kecamatan Binamu yang merupakan sebagian dari Kabupaten Daerah tingkat II Jeneponto yang termasuk daerah tropis yaitu lintasan khatulistiwa menyebabkan musim hujan tidak menentu. Akan tetapi untuk wilayah kecamatan Binamu mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya sekitar bulan Nopember sampai dengan bulan April.

Sedangkan musim kemarau pada bulan mei sampai dengan Oktober. Dari keadaan ini merupakan faktor penentu atau penunjang keberhasilan para petani, karena telah mengetahui sebelumnya musim-musim yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan musim yang dapat digunakan untuk pekerjaan lainnya.

Pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 musim hujan tidak merata sebagaimana mestinya, akibatnya hasil pertanian turun secara drastis. Para petani yang bergerak

di bidang pertanian tidak dapat mengelolah sawahnya akibat tidak adanya hujan. Dan pada keadaan kritis ini, masyarakat hanya dapat menanam bawang, kol dan sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan dan adapula yang menjadi tukang, baik itu tukang kayu maupun tukang becak dan sebagian masyarakat pegawai negeri, usaha tersebut membawa hasil yang memuaskan bagi masyarakat, agar terlepas dari ancaman kelaparan.

2. Keadaan Demografis.

a. Jumlah Penduduk.

Kabupaten Dati II Jeneponto meliputi 5 kecamatan, adapun Wilayah Kecamatan Binamu yang meliputi 3 Kelurahan dan 6 Desa dengan jumlah penduduk berdasarkan data Statistik terakhir tahun 1990 adalah berjumlah 57.840 jiwa yang terdiri dari 27.864 jiwa laki-laki dan 29.976 jiwa perempuan, terbagi dalam golongan penduduk Warga negara asing dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 2

Jumlah Penduduk diperinci Menurut Desa/
Kelurahan, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin

| No | Desa/ Kelurahan | Kewarganegaraan | | | | % |
|----|--------------------|-----------------|-------|-------|----|-----|
| | | W N I | | W N I | | |
| | | LK | PR | LK | PR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Empoang | 5539 | 6037 | - | - | 20 |
| 2 | Pabiringa | 5404 | 5694 | - | - | 15 |
| 3 | Balang | 4218 | 4340 | - | - | 19 |
| 4 | Bontomatene | 2375 | 2631 | - | - | 9 |
| 5 | Kayu Loe | 2162 | 2325 | - | - | 8 |
| 6 | Paitana | 2879 | 2942 | - | - | 10 |
| 7 | Mangepong | 1834 | 1595 | - | - | 6 |
| 8 | Sapanang | 1877 | 2582 | - | - | 8 |
| 9 | Bulo Loe | 1776 | 1830 | - | - | 6 |
| | Jumlah | 27864 | 29976 | - | - | 100 |

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto
Tahun 1990

Dari data tersebut terlihat bahwa penyebaran penduduk dari masing-masing desa saling berbeda dan tidak merata dengan tingkat pendapatan penduduk yang sangat padat.

Bila dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah ini masih tergolong potensial untuk dikembangkan. Untuk

lebih jelasnya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Binamu adalah sebagai berikut :

TABEL 3
Jumlah Penduduk Diperinci menurut
Desa/Kelurahan, luas dan kepadatan.

| No | Desa/ Kelurahan | Jumlah Penduduk | Luas (km 2) | Kepadatan penduduk (jiwa/km2) |
|----|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Empoang | 11576 | 31,74 | 267 |
| 2 | Pabiringan | 11098 | 19,56 | 430 |
| 3 | Balang | 8558 | 11,61 | 603 |
| 4 | Bontomate'ne | 5006 | 8,64 | 306 |
| 5 | Kayu Loe | 4467 | 10,42 | 197 |
| 6 | Paitana | 5821 | 11,24 | 500 |
| 7 | Mangepong | 3229 | 15 | 45 |
| 8 | Sapanang | 4459 | 10,73 | 296 |
| 9 | Bulu Loe | 3606 | 8,08 | 160 |
| | Jumlah | 57840 | 127,04 | 2804 |

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto tahun 1990

Dalam rincian tersebut nampak bahwa penyebaran penduduk bila dibandingkan dengan luas desa masing-masing ternyata angka kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Empoang. Disusul dengan desa-desa lainnya seperti Desa Paitana, Desa Bontomate'ne dan seterusnya.

Sedangkan paling rendah kepadatan penduduk adalah Desa Mangepong untuk seluruh Kecamatan Binamu yang jumlah penduduknya 57840 jiwa dengan luas Wilayah 127,04 km² maka kepadatan penduduk adalah 2804 km² masuk dalam kategori padat penduduknya.

Timbul suatu pertanyaan bagaimanakah keadaan penduduk yang ideal itu ?. Secara singkat penulis berpendapat bahwa penduduk yang ideal adalah suatu keadaan penduduk yang harus seimbang dengan sumber-sumber alam dengan lapangan kerja yang tersedia. Keadaan penduduk yang jelas seperti jumlah penduduk baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin.

Sementara itu pengelompokan penduduk berdasarkan umur yang biasanya dipakai dalam penentuan beban tanggungan (usia belum produktif, usia produktif dan yang non produktif). Hal tersebut penting sekali guna memperkirakan kebutuhan maupun penyediaan lapangan kerja dimasa mendatang.

Sesuai dengan data penulis kumpulkan terlihat jumlah penduduk usia produktif di Kecamatan Binamu (20 keatas) sebanyak 28955 jiwa dari jumlah penduduk yang terdiri dari 13393 jiwa laki-laki dan 15562 jiwa perempuan.

Untuk lebih jelasnya pengelompokan penduduk menurut jenis dan kelompok umur adalah sebagai berikut :

TABEL 4

Struktur Penduduk Diperinci Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------|---------------|-------|--------|
| | | LK | PR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 00 - 04 | 1736 | 1571 | 3307 |
| 2 | 05 - 09 | 3781 | 3573 | 7354 |
| 3 | 10 - 14 | 3954 | 3821 | 7775 |
| 4 | 15 - 19 | 3983 | 3821 | 7804 |
| 5 | 20 - 24 | 2342 | 2451 | 4793 |
| 6 | 25 - 29 | 1865 | 2205 | 4070 |
| 7 | 30 - 34 | 1445 | 1777 | 3222 |
| 8 | 35 - 39 | 1439 | 1599 | 3038 |
| 9 | 40 - 44 | 1104 | 1321 | 2425 |
| 10 | 45 - 49 | 1312 | 1566 | 2878 |
| 11 | 50 - 54 | 905 | 1131 | 1036 |
| 12 | 55 - keatas | 2981 | 3512 | 6493 |
| | Jumlah | 26847 | 28348 | 55195 |

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto tahun 1990

Berdasarkan data tersebut nampak bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah 20 - 54 tahun sebanyak 28955 jiwa dari jumlah penduduk yang ada (usia produktif) sementara umur/usia belum produktif sebanyak 26240 jiwa,

sedangkan sisanya antara umur 55 keatas (tidak produktif lagi) sebanyak 6493 jiwa.

Kalau dikaji lebih jauh perbandingan antara usia belum produktif adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan usia produktif. Hal ini merupakan satu kebanggaan dimasa mendatang dalam hal penyediaan dan pemenuhan lapangan kerja.

Walaupun dari segi kegiatan penduduknya dapat diperkirakan sebagian besar adalah sebagai petani, namun bukan berarti bahwa tenaga kerja yang ada dengan lapangan pekerjaan tidak memperoleh perhatian, sebab dikhawatirkan dalam 10 tahun mendatang akan terjadi peledakan penduduk khususnya pencari kerja.

b. Mata Pencabarian.

Mata pencaharian yang utama penduduk daerah ini adalah bertani, nelayan, berdagang dan pegawai dan tukang.

Adapun petani yang mengolah sawahnya dilakukan secara tradisional. Sedangkan masyarakat yang bergerak disektor Perikanan sebagai Nelayan yang masih mempergunakan alat tradisional seperti pukatnya alat tradisional ini dapat dirubah dengan cara yang lebih efisien.

Dalam era pembangunan dewasa ini pemerintah mengupayakan agar masyarakat dalam bentuk kegiatan di

bidang ekonomi disiapkan fasilitas yang cukup dalam arti motorisasi.

Kenyataan tersebut masyarakat banyak terbentur pada modal dan setiap kegiatan salah satu faktor penunjang keberhasilan adalah modal utamanya adalah modal material, karena dengan hal tersebut akan membantu modal tenaga yang cukup besar tersedia didaerah pedesaan. Sesuai dengan pengamatan penulis bahwa para petani yang terdapat pada Wilayah Kecamatan Binamu tidak dapat digolongkan petani profesional. Oleh karena disamping petani sawah juga petani kebun dan nelayan, sehingga kalau perhitungan hasil yang dicapai beban keuntungan yang diinginkan tetapi ternyata kerugian.

Kesemuanya ini disebabkan karena sebagian penduduk tidak dapat menggunakan waktu secara ekonomis yaitu lebih banyak waktu terbuang daripada mengurus sawah, kebun dan usaha lainnya.

c. Pendidikan.

Berkembang tidaknya suatu masyarakat ditentukan oleh faktor pendidikan itu sendiri. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan semakin lambat pula perkembangan suatu bangsa. Telah menjadi tekad dan perhatian pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar dan telah menjalani pendidikan sesuai dengan ketentuan tersebut adalah merupakan indikator pada tingkat keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk Kecamatan Binamu fasilitas pendidikan baik negeri/inpres maupun swasta telah tersedia 4 unit taman kanak-kanak, 51 unit sekolah dasar, 2 madrasah, 6 unit sekolah menengah dan 7 unit sekolah lanjutan atas yang tersebar pada semua desa dan kelurahan. Dengan demikian menunjukkan bahwa setiap desa memiliki beberapa unit gedung sekolah dasar sehingga sangat mendukung program wajib belajar bagi anak usia 7 - 12 tahun.

Keadaan fasilitas pendidikan dapat diperinci sebagai berikut :



TABEL 5

Jumlah Sekolah Diperinci Menurut Desa
Kelurahan, Murid, Guru dan Jenis Kelamin

| No | Desa/ Kelurahan | Jumlah Sekolah | J u m l a h | | | |
|----|--------------------|-------------------|-------------|------|------|-----|
| | | | Murid | | Guru | |
| | | | LK | PR | LK | PR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Empoang | 8 | 933 | 1039 | 28 | 53 |
| 2 | Pabiringa | 11 | 1115 | 1035 | 28 | 83 |
| 3 | Balang | 8 | 1003 | 869 | 26 | 63 |
| 4 | Bontomate'ne | 4 | 477 | 481 | 20 | 16 |
| 5 | Kayu Loe | 8 | 598 | 511 | 27 | 22 |
| 6 | Paitana | 4 | 487 | 582 | 17 | 18 |
| 7 | Mangepong | 2 | 196 | 231 | 6 | 8 |
| 8 | Sapanang | 5 | 598 | 567 | 23 | 25 |
| 9 | Bulu Loe | 3 | 313 | 350 | 18 | 6 |
| | Jumlah | 51 | 5720 | 5615 | 194 | 284 |

Sumber data : Kantor Dinas P & K Kecamatan Binamu
Kabupaten Jeneponto Tahun 1990

Dari rincian diatas terlihat bahwa fasilitas sekolah sudah cukup memadai bila dibandingkan dengan minat anak usia sekolah. Keadaan ini disesuaikan dengan penyebaran penduduk dimasing-masing desa dan perhatian penuh diprioritaskan pada penyediaan gedung sekolah sesuai dengan kondisi masyarakat tadi.

d. Kesehatan.

Selain sektor pendidikan maka sektor kesehatan masyarakat perlu pula dikembangkan, karena bagaimanapun pintarnya seseorang kalau kesehatannya terganggu (sakit) maka orang tersebut tidak dapat melaksanakan pembangunan usaha kesehatan masyarakat. Sesungguhnya merupakan tanggungjawab pemerintah semata-mata, akan tetapi melibatkan seluruh anggota masyarakat.

Namun bagaimanapun juga karena kesehatan memerlukan kesadaran meningkatkan peran serta masyarakat dalam menunjang suksesnya kesehatan melalui bimbingan dan penyuluhan pihak petugas kesehatan. Dengan bertolak anggapan masyarakat bahwa dukunlah yang lebih bisa menyembuhkan segala macam penyakit, yang diderita, dianggapnya datangnya dari roh jahat. Tidak ada dalam pemikiran mereka bahwa sesungguhnya penyakit itu adalah akibat dari tidak diperhatikannya mengenai kebersihan, istirahat, makan makanan yang tidak memenuhi syarat gizi dan tidak memenuhi cara penularan penyakit.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka pemerintah melalui dinas kesehatan mencanangkan pelayanan kesehatan ke pelosok tanah air. Dapat dilihat bahwa setiap Ibukota kecamatan telah didirikan Pusat Kesehatan Masyarakat atau PUSKESMAS termasuk Wilayah Kecamatan Binamu, sarana kesehatan tersebut telah dibangun sejak tahun 1977 yang dapat melayani penduduk wilayah itu,

bahkan penderita yang datang dari wilayah kecamatan lainnya.

Perkembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pelayanan terpadu PUSKESMAS dengan tenaga-tenaga kesehatan medis, dan biaya yang murah, maka sarana kesehatan setiap tahunnya ditambah/didirikan oleh pemerintah. Khusus di Wilayah Kecamatan Binamu sarana dan prasarana kesehatan berupa PUSKESMAS rata-rata setiap harinya 25 orang, belum termasuk masyarakat yang berobat pada PUSKESMAS pembantu dan praktek dokter.

Untuk menjangkau pelayanan pada PUSKESMAS pembantu pada 3 kelurahan dan 6 desa masing-masing desa Sapanang, Paitana, Bontomate'ne dan Bulu Loe. Dan praktek waktu pelayanan yang tersedia pada PUSKESMAS Induk untuk pemeriksaan dokter hanya 4 hari dalam seminggu.

e. Keluarga Berencana.

Pada skripsi ini, penulis gambarkan pelaksanaan program KB serta hasil yang dicapai di Wilayah Kecamatan Binamu, karena disamping merupakan Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan di wilayah juga merupakan program nasional yang perlu disukseskan secara terpadu oleh berbagai departemen dan masyarakat.

Program KB merupakan usaha langsung yang bertujuan mengurangi tingkat kelahiran melalui alat kontrasepsi dan lestari dan bukan seperti yang dikatakan sementara orang bahwa program KB adalah untuk membatasi kelahiran. Tujuan

program KB adalah untuk membatasi kelahiran dalam norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS), dimana ditekankan bahwa keluarga baru hendaknya hanya mempunyai 2 anak.

Bertitik tolak dari pengertian dan tujuan pokok tersebut, diatas maka kegiatan penyuluhan tentang pentingnya Pasangan Usia Subur (PUS) mendaftarkan diri sebagai akseptor KB dengan menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan keinginan dan hasil pemeriksaan dokter/bidan.

Penerimaan masyarakat diwilayah Kecamatan Binamu akan program KB menunjukkan hasil yang positif dimana pasangan usia subur yang terdaftar 2786 orang sedangkan yang berhasil secara sukarela mengikuti program sebanyak 894 orang dengan menggunakan beberapa jenis alat kontrasepsi.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

TABEL 6
Jumlah Akseptor KB dan Alat Kontrasepsi
yang digunakan tahun 1989/1990

| No | Desa | PUS | Alat ontrasepsi | | | | JLH |
|----|--------------|------|-----------------|-------------|-----|-----|-------|
| | | | PIL | Kontrasepsi | | | |
| | | | | IUD | STK | KON | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Empoang | 291 | 555 | 6 | 91 | - | 943 |
| 2 | Pabiringa | 494 | 8864 | 24 | 196 | 12 | 9590 |
| 3 | Balang | 224 | 331 | 6 | 108 | - | 668 |
| 4 | Bontomate'ne | 277 | 315 | 2 | 160 | - | 758 |
| 5 | Kayu Loe | 469 | 936 | - | 15 | - | 631 |
| 6 | Paitana | 465 | 936 | - | 153 | - | 1554 |
| 7 | Mangepong | 56 | 132 | - | 12 | - | 200 |
| 8 | Sapanang | 332 | 546 | - | 150 | - | 1028 |
| 9 | Bulu Loe | 178 | 432 | - | 34 | - | 644 |
| | Jumlah | 2786 | 12456 | 63 | 919 | 12 | 16236 |

Sumber data : Kantor Puskesmas Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 1990

f. Agama

Negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila menjamin kehidupan dan pertumbuhan agama bahkan mendapat prioritas pertama. Dapat dirasakan adanya

ketenangan dalam melaksanakan dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing secara bebas dan bertanggung jawab dan penuh solidaritas.

Dalam pelaksanaan pembangunan seluruh umat beragama terlibat dan turut serta tanpa ada perbedaan diantara umat beragama. Suatu hal yang sangat dibanggakan dimana masyarakat telah menyadari pentingnya saling pengertian dan toleransi dikalangan umat beragama yang akan menjamin adanya kestabilan keamanan.

Berdasarkan data umum sarana keagamaan di Wilayah Kecamatan Binamu sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL 7
Prasarana dan Sarana Ibadah
di Wilayah Kecamatan Binamu



| No | Sarana Ibadah | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mesjid | 41 | |
| 2 | Gereja | - | |
| 3 | Pura | - | |
| 4 | Musallah | 32 | |
| | Jumlah | 73 | |

Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu
Kabupaten Jeneponto Tahun 1990.

Dari jumlah penduduk Kecamatan Binamu sebanyak 57840 jiwa, menganut beberapa aliran agama sesuai kehendak hati nuraninya, dimana penduduk pada umumnya beragama Islam.

Lengkapnya penulis sajikan pada tabel berikut ini, dimana akan menggambarkan keadaan sebenarnya kehidupan beragama di Kecamatan Binamu dalam hubungannya dengan pembangunan, dimana umat beragama sangat baik sekali.

TABEL 6
Jumlah Penduduk Kecamatan Binamu
Menurut Agama

| No | Agama | Jumlah Pemeluk | Prasentase |
|----|--------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Islam | 57767 | |
| 2 | K. Katolik | 14 | |
| 3 | K. Protestan | 48 | |
| 4 | Hindu | 6 | |
| 5 | Buddha | 5 | |
| | Jumlah | 57840 | |

Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu
Kabupaten Jeneponto Tahun 1990

B. Struktur organisasi dan tata kerja sekretariat Wilayah Kecamatan Binamu.

Dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sesuai dengan pasal 73 (3)

UU nomor 5 tahun 1974 bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kepala Wilayah Kota Administratif dan Kepala Wilayah Kecamatan diatur dengan peraturan Menteri dalam Negeri.

Dan realisasi bunyi pasal 79 ayat 3 UU nomor 1974 tersebut berbunyi, pengangkatan Kepala wilayah Kota Administratif dan Camat diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1974 pada pasal 4 dan pasal 5.

Pengangkatan kepala wilayah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menjamin kestabilan keamanan di Wilayah Kecamatan sangat penting artinya. Tugas yang diemban oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan tidak jauh berbeda dengan tugas Gubernur dan Bupati, karena tiga unsur tersebut merupakan wakil-wakil dari pemerintah pusat (Presiden) di daerah.

Secara umum tugas seorang camat meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- Pemerintah
- Ketertiban dan Keamanan Wilayah
- Politik
- Ekonomi
- Sosial Budaya
- Pembangunan
- Keagrariaan dan
- Administrasi

Dalam uraian tersebut diatas jelas bahwa hakekatnya Camat/Kepala Wilayah Kecamatan mempunyai tugas dan

tanggungjawab yang berat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tugas dan tanggungjawab seorang Camat yang sangat luas menuntut adanya kerja keras, keterampilan dan pengetahuan yang luas. Sebagai manusia tentunya mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam mencapai semua ini, untuk itu dalam melaksanakan dan mengemban tugas-tugas yang dipercayakan Negara dan masyarakat, Camat dibantu oleh staf yang bertugas pada bidangnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan ini akan terjadi suatu kesatuan komando, oleh karena bagian-bagian para komando para pembantu camat telah diorganisasikan dalam suatu wadah organisasi yang biasa disebut kantor camat. Menurut Dimock dan Dimock bahwa :

"Organisasi ialah pengaturan secara sistimatis bagian-bagian yang saling menguntungkan bersama-sama membentuk suatu keseluruhan yang bulat melalui kekuasaan, koordinasi dan pengawasan dapat dijalankan untuk mencapai maksud tertentu". (Dimock, 1986 : 21).

Pernyataan gerak dan langkah dalam organisasi pemerintah Kecamatan dalam hubungan pelaksanaan operasional tugas masing-masing bagian adalah merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pembangunan dewasa ini.

Dengan menyadari betapa luasnya tanggung jawab Camat dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat di Wilayah kerjanya, maka sesuai peraturan menteri dalam negeri Nomor 69 tahun 1973 dibentuklah struktur

organisasi pemerintahan Kecamatan, yang terdiri dari beberapa staf pembantu yakni :

1. Camat
2. satuan Polisi pamong Praja
3. Kepala kantor
4. Urusan pembinaan Masyarakat
5. Urusan pembangunan masyarakat desa

Akan tetapi perkembangan dan kemajuan, serta kebutuhan senantiasa mendesak, khususnya pada pemerintah Wilayah Kecamatan Binamu utamanya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu ditinjau kembali Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 69 tahun 1973.

Dengan demikian meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam era pembangunan Nasional di segala bidang yang implementasinya sampai ke desa-desa, maka pemerintah kecamatan sebagai aparat terdepan menjalani perubahan dalam kehidupan organisasinya.

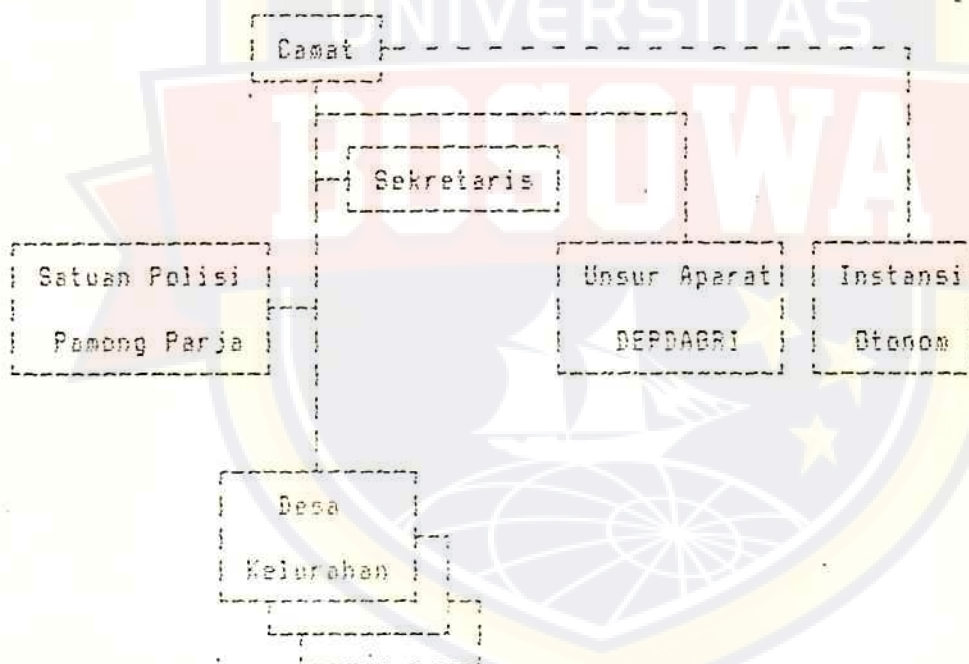
Ini dimaksudkan agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan lebih terarah mencapai sasaran, demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercantum pada UUD 1945 masyarakat adil dan makmur.

Penyempurnaan Peraturan menteri dalam Negeri nomor 69 tahun 1973 tentang struktur organisasi dan tata kerjanya yang dituangkan dalam keputusan menteri dalam negeri

nomor 83 tahun 1984 tentang pola organisasi pemerintahan Kecamatan yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Wilayah Kecamatan
- c. Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Unsur Aparat Departemen Dalam Negeri

Struktur pola organisasi pemerintahan Wilayah Kecamatan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 82 tahun 1984.



Keterangan :

- - - - - Garis Komando
- - Garis Koordinasi

B A B IV

ANALISA PENGARUH PROGRAM BANTUAN DESA TERHADAP
PARTISIPASI DAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNANA. Pengaruh Program Bantuan Desa terhadap Partisipasi dan
Swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Tidak dapat di sangkal, bahwa modal utama masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan ialah swadaya dan gotong royong, yang masih berurat dan berakar dalam pola kehidupan mereka sehari-hari. Modal utama ini perlu dibina dan dikembangkan sebaik-baiknya khususnya di Kecamatan Binamu.

Usaha swadaya dan gotong-royong dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa baik secara individual maupun kelompok dapat membuat hasil yang meliputi berbagai hal, misalnya ekonomi, produksi, sosial atau perlengkapan desa lainnya.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah adanya Program Inpres Bantuan Desa yang bertujuan untuk merangsang dan mendorong swadaya gotong royong masyarakat, tentunya diharapkan akan membawa sejumlah perubahan dalam berbagai bentuk kegiatan. Paling tidak dapat menghadirkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa.

Secara fisik maupun non fisik Inpres Bantuan Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan Binamu dengan menghadirkan berbagai programnya sedikit banyaknya membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat pedalaman, khususnya masyarakat desa di Kecamatan Binamu.

Kalau melihat pencapaian hasil pembangunan selama Pelita keempat dan Pelita Kelima tahun pertama sesuai dengan program desa tersebut menampakkan berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembangunan desa.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penggunaan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Binamu dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 9

Penggunaan Program Bantuan Pembangunan Desa
di Kecamatan Binamu

Periode 1985/1986

| No | Desa/Kel. | Program | Sumber - Biaya | | |
|--------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | Swadaya (Rp) | Pusat (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Eapoang | Mesjid | 350.000 | 1.350.000 | 1.700.000 |
| 2. | Balang | Kursi PKK Lokasi LKMD | 100.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
| 3. | Pabiringa | Pos Ronda Bossara | 250.000 | 1.350.000 | 1.600.000 |
| 4. | Bontomate'ne | Balai Pert. Bossara | 300.000 | 1.350.000 | 1.650.000 |
| 5. | Paitana | Balai Pert. Kursi PKK | 250.000 | 1.350.000 | 1.600.000 |
| 6. | Paitana | Balai Pert. Kursi PKK | 300.000 | 1.350.000 | 1.650.000 |
| Jumlah | | - | 1.550.000 | 8.100.000 | 9.650.000 |

Priode 1986/1987

| No | Desa/Kel. | Sumber - Biaya | | | |
|--------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Program | Swadaya (Rp) | Pusat (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Empoang | Kip Hiprida | 250,000 | 1,350,000 | 1,600,000 |
| 2. | Balang | Kip Hiprida | 300,000 | 1,350,000 | 1,650,000 |
| 3. | Pabiringa | Kip Hiprida Pemb. Tempe | 250,000 | 1,350,000 | 1,600,000 |
| 4. | Bontomate'ne | Kip Hiprida | 300,000 | 1,350,000 | 1,650,000 |
| 5. | Paitana | Kip Hiprida | 500,000 | 1,350,000 | 1,850,000 |
| 6. | Sapanang | Kip Hiprida | 300,000 | 1,350,000 | 1,650,000 |
| 7. | Mangepong | Kantor Desa P. Pengantin | 3,000,000 | 1,350,000 | 4,350,000 |
| 8. | Kayuloe | Kantor Desa Sanggar PKK | 3,000,000 | 1,350,000 | 4,350,000 |
| 9. | Bululoe | Kantor Desa Sanggar PKK | 3,550,000 | 1,350,000 | 4,900,000 |
| Jumlah | | - | 11,450,000 | 12,150,000 | 23,600,000 |

Priode 1987/1988

| No | Desa/Kel. | Sumber - Biaya | | | Jumlah (Rp) |
|--------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Program | Swadaya (Rp) | Pusat (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Empoang | Klp Hiprida Rosara | 300.000 | 1.350.000 | 1.650.000 |
| 2. | Balang | Klp Hiprida | 200.000 | 1.350.000 | 1.550.000 |
| 3. | Pabiringa | Klp Hiprida Kursi PKK | 200.000 | 1.350.000 | 1.550.000 |
| 4. | Bontomatene | Klp Hiprida | 350.000 | 1.350.000 | 1.700.000 |
| 5. | Paitana | Klp Hiprida | 300.000 | 1.350.000 | 1.650.000 |
| 6. | Sapanang | Klp Hiprida | 250.000 | 1.350.000 | 1.600.000 |
| 7. | Mangepong | Klp Hiprida | 250.000 | 1.350.000 | 1.600.000 |
| 8. | Kayulce | Klp Hiprida Brg.Koperasi | 200.000 | 1.350.000 | 1.550.000 |
| 9. | Bululoe | Klp Hiprida P.Pengantin | 275.000 | 1.350.000 | 1.625.000 |
| Jumlah | | - | 2.325.000 | 12.150.000 | 14.475.000 |



Priode 1988/1989

| No | Desa/Kel. | Sumber - Biaya | | | Jumlah (Rp) |
|--------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Program | Swadaya (Rp) | Pusat (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Empoang | Mag. Akolasi | 250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| 2. | Balang | Mag. Akolasi | 250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| 3. | Pabiringa | Mag. Akolasi | 250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| 4. | Bontomate'ne | Mag. Akolasi | 350.000 | 1.500.000 | 1.850.000 |
| 5. | Paitana | Mag. Akolasi | 200.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
| 6. | Sapanang | Mag. Akolasi | 250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| 7. | Mangapong | Mag. Akolasi | 250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| 8. | Kayuloe | Mag. Akolasi | 200.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
| 9. | Bululoe | Mag. Akolasi Kursi PKK | 150.000 | 1.500.000 | 1.650.000 |
| Jumlah | | - | 2.150.000 | 13.500.000 | 15.650.000 |

Priode 1989/1990

| No | Desa/Kel. | Sumber - Biaya | | | |
|--------|--------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Program | Swadaya (Rp) | Pusat (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Empoang | Mag. Akolasi | 200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 2. | Balang | Mag. Akolasi | 200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 3. | Pabiringa | Mag. Akolasi | 250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 |
| 4. | Bontomate'ne | Mag. Akolasi | 250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 |
| 5. | Paitana | Mag. Akolasi | 200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 6. | Sapanang | Mag. Akolasi | 250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 |
| 7. | Hangepong | Mag. Akolasi | 200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 8. | Kayuloe | Mag. Akolasi | 200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 9. | Bululoe | Mag. Akolasi | 350,000 | 1,500,000 | 1,850,000 |
| Jumlah | | - | 2,100,000 | 13,500,000 | 15,600,000 |

Periode 1990/1991

| No | Desa/Kel. | Program | Sumber - Biaya | | |
|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | Swadaya (Rp) | Pusat (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Empoang | Pengairan Ds | 750.000 | 2.500.000 | 3.250.000 |
| 2. | Balang | Duiker Usaha S.Pjm | 500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 3. | Pabiringa | Mag. Akolasi Pemb. Bosara | 600.000 | 2.500.000 | 3.100.000 |
| 4. | Bontomatene | Jembatan Usaha S.Pjm | 450.000 | 2.500.000 | 2.950.000 |
| 5. | Paitana | Mag. Akolasi Al. Pengantin | 650.000 | 2.500.000 | 3.150.000 |
| 6. | Sapanang | Duiker Usaha S.Pjm | 550.000 | 2.500.000 | 3.050.000 |
| 7. | Mangepong | Jembatan Mesin jahit | 600.000 | 2.500.000 | 3.100.000 |
| 8. | Kayuloe | Pengairan Ds Pemb. Kursi | 300.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
| 9. | Bulu ioe | Kios Pasar saha S.Pjm | 500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Jumlah | | - | 4.900.000 | 22.500.000 | 27.400.000 |

Sumber Data : Kantor Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Dati II

Jenepono tahun 1985 / 1986 - 1990 / 1991.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh Inpres Bangdes sudah nampak dengan adanya wadaya masyarakat.

Dengan demikian pembangunan desa, khususnya proyek bantuan pembangunan desa di Kecamatan Binamu dapat mempengaruhi atau merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, keberhasilan ini disebabkan karena aspirasi (keinginan) benar-benar diperhatikan. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat menjadi semakin meningkat dan percaya pada diri sendiri, baik dalam bentuk sumbangan pikiran tenaga, waktu dan materi serta fisik dengan sukarela tanpa pamrih.

Dengan demikian masyarakat bukan menjadi objek pembangunan tetapi sebaliknya menjadi subjek pembangunan. Dalam hubungan ini berarti bantuan pembangunan desa dapat memenuhi fungsinya yaitu untuk mendorong dan merangsang masyarakat untuk lebih giat membangun.

Sebagai gambaran untuk mengetahui berpengaruh tidaknya Program Inpres Bantuan Pembangunan desa terhadap partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

TABEL 10

Tanggapan responden terhadap pengaruh Bantuan

Desa dalam berpartisipasi, dalam pembangunan Desa

| Sampel Desa/Kelurahan | Berpe- ngaruh | Kurang ber- pengaruh | Tidak ber- pengaruh | Total |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| | F % | F % | F % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Empoang | 7 18,0 | 6 15,0 | - 0,0 | 13 33,0 |
| - Bontomatene | 8 20,0 | 5 13,0 | - 0,0 | 13 33,0 |
| - Mangepang | 8 20,0 | 5 13,0 | - 0,0 | 13 33,0 |
| Total | 23 58,0 | 16 41,0 | - 0,0 | 39 100,0 |

Sumber Data : Hasil wawancara dengan responden 15 s/d 30
Desember 1990

Dari daftar olahan data tersebut menunjukkan perhatian yang sangat besar dari pihak masyarakat dalam kehadiran Inpres Bantuan Pembangunan Desa ditengah-tengah mereka dimana 39 responden dari tiga desa, sampel 23 (58,0 %) responden menyatakan berpengaruh, 16 (41,0 %) responden menyatakan kurang berpengaruh sedangkan penilaian tidak berpengaruh adalah 0,0 %.

Kalau kita kaitkan dengan pencapaian hasil pelaksanaan program bantuan pembangunan desa sejak

pelita keempat sampai pelita kelima tahun pertama menunjukkan bahwa di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto seperti uraian di atas, maka penilaian dari 23 (58,0 %) responden yang penulis wawancarai langsung menyatakan bahwa Inpres Bantuan Pembangunan Desa memberi pengaruh/terpengaruh dalam kegiatan pembangunan desa bukanlah suatu hal yang tidak beralasan.

Namun dari hasil yang telah dicapai selama ini adalah merupakan perjuangan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan didaerah ini yang pada tentunya diharapkan merubah dan membuka cakrawala berpikir mereka ke arah yang lebih baik. Sehingga masyarakat di samping sebagai obyek juga sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan mempunyai penilaian terhadap semua program yang masuk desa termasuk diantaranya Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

Sehubungan dengan itu penulis berhasil mewawancarai babarapa responden dari kalangan masyarakat seperti pengurus LKMD, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat. Dari keterangan mereka bahwa bantuan yang diberikan kepada Presiden (Pemerintah) kepada masyarakat memberi pengaruh yang baik untuk membangun proyek-proyek desa seperti Jembatan desa, mesjid, irigasi, sekolah dan sebagainya, membawa manfaat kepada masyarakat.

B. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan desa.

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka desa dan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan harus mampu menciptakan faktor-faktor strategi disatu pihak dan sekaligus mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor penghambat dalam pembangunan.

Dengan demikian disamping kepentingan desa dan masyarakat desa kepentingan regional dan nasional akan terpenuhi pula, dimana desa memegang peranan utama dalam pemberian dasar dan landasan bagi pembangunan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Adapun faktor-faktor strategi yang perlu dimaksudkan disini adalah pembinaan masyarakat agar dapat terlibat dalam proses pembangunan. Ini dikemukakan Drs.H.M.THALA dalam diktatnya "Pembangunan masyarakat Desa dan daerah pedesaan di Indonesia" adalah :

1. Faktor pendidikan kader-kader pembangunan, baik pria maupun wanita warga desa itu sendiri;
2. Faktor ekonomi pedesaan, berupa penguasa hasil produksi, pemasaran hasil produksi dan permodalan (perkreditan);
3. Faktor organisasi desa, dalam pemerintahan desa yang dinamis dengan mekanisme yang berdaya guna dan berhasil guna;
4. Faktor kepemimpinan yang terbuka, dan terpadu dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang nyata;
5. Faktor kesediaan mengabdikan dan kesediaan bermasyarakat desa yang terarah dan berorientasi

kepada pembangunan desa demi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa yang lebih merata dan lebih adil sesuai dengan pembangunan nasional". (Thala : 1988. 31)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas ialah masih adanya kecenderungan masyarakat desa memerlukan bantuan baik dana maupun teknis guna memungkinkan mereka mengadakan penyesuaian dengan perkembangan yang cepat dalam rangka pembangunan desa.

Kecenderungan lainnya dari pembangunan masyarakat desa ialah mereka itu bekerja dengan kelompok dan bukan bekerja dengan individu dalam masyarakat, sambil berusaha agar sebanyak mungkin anggota masyarakat bisa turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa mereka.

Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek bantuan Desa menurut kutipan di atas adalah :

B.1 Pemberian Pendidikan terhadap kader-kader pembangunan.

Untuk merubah desa dari proyek pembangunan menjadi subyek pembangunan, maka perlu diusahakan peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat. Untuk itu akan dikembangkan lebih lanjut Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa.

Dalam rangka peningkatan fungsi lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai masyarakat akan dilatih kaderkader yang terdiri dari

Kepala Desa, wanita dan pemuda dan lain sebagainya menjadi Kader Pembangunan Desa (KPD), yang merupakan motor penggerak LKMD dalam membantu pemerintah desa membangun desanya.

Dalam rangka usaha memantapkan desa sebagai landasan yang kuat bagi ketahanan nasional, maka LKMD sebagai Lembaga yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri merupakan suatu Lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan gotong royong dalam pembangunan dan berfungsi sebagai pembantu Kepala Desa/Kelurahan untuk menyusun rencana pembangunan Desa/Kelurahan, atas dasar hasil musyawarah dan mufakat, membina dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam rangka menumbuhkan dinamika serta meningkatkan gairah masyarakat desa untuk membangun desanya.

Melalui LKMD dapat dibina dan diciptakan kader-kader pembangunan yang kelak akan menjadi pelopor dalam pembangunan desa. Adapun kegiatan LKMD meliputi usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Pembinaan organisasi serta kepemimpinan dan penyelenggaraan musyawarah LKMD;
- b. Sebagai pembimbing, penyuluh, motivasi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa;

c. Peningkatan kegiatan pelaksanaan proyek-proyek swadaya masyarakat desa, baik yang mendapat bantuan dari pemerintah maupun swadaya murni masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka peningkatan peranan wanita dalam pembangunan melalui wadah PKK sehingga kaum wanita dapat mengembangkan kreatifitas dan rasa tanggung jawab mereka dalam membina keluarga sejahtera dan bahagia. Di samping peningkatan peranan kaum wanita dalam proses pembangunan, juga ditingkatkan peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini termasuk upaya penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penggunaan bantuan pembangunan desa khususnya Bantuan Peningkatan Peran serta Masyarakat (BP2M) di Kecamatan Binamu dapat dilihat pada tabel berikut



TABEL 11

Penggunaan Bantuan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Binamu

| Sumber - Biaya | | | | | |
|----------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|
| No | Periode | Jenis Proyek | Swadaya (Rp) | Pusat (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1985/1986 | Latihan LKMD | - | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | Mewasyaratkan Juklat Inpres Bantuan Desa | - | 200.000 | 200.000 |
| | | J u m i a h | | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 2 | 1986/1987 | Latihan Penge- lojaan UED, RPP dan KUD | - | 450.000 | 450.000 |
| | | Latihan Kaur- Bangdes Ket. | - | 350.000 | 350.000 |
| - | 1986/1987 | Mewasyaratkan Juklat Inpres Bantuan Desa | - | 250.000 | 250.000 |
| | | Pengembangan Modal UED | - | 250.000 | 250.000 |
| | | J u m i a h | | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3 | 1987/1988 | Pengumpulan Da- ta Potensi Desa & Diskusi UDKP | - | 100.000 | 100.000 |
| | | Latihan KPD | - | 450.000 | 450.000 |
| | | Latihan UED | - | 200.000 | 200.000 |
| | | Bantuan Modal U. E. D. | - | 200.000 | 200.000 |
| | | J u m i a h | - | 1.150.000 | 1.150.000 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 4 | 1988/1989 | Latihan KPD | - | 1.045.000 | 1.045.000 |
| | | Latihan Kades | - | 255.000 | 255.000 |
| | | Latihan UED | - | 450.000 | 450.000 |
| | | Latihan Peman- tapan UDKP | - | 150.000 | 150.000 |
| | | J u m l a h | - | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 5 | 1989/1990 | Latihan KPD | - | 820.000 | 820.000 |
| | | Latihan Kades | - | 180.000 | 180.000 |
| | | Latihan UED | - | 100.000 | 100.000 |
| | | Modal KUD | - | 300.000 | 300.000 |
| | | Supervisi UED | - | 50.000 | 50.000 |
| | | Diskusi UDKP | - | 325.000 | 325.000 |
| | | Monitoring- Tingkat Perkem- bangan Desa | - | 125.000 | 125.000 |
| | | J u m l a h | - | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 6 | 1990/1991 | Modal UED | - | 700.000 | 700.000 |
| | | Latihan KPD | - | 500.000 | 500.000 |
| | | Diskusi UDKP | - | 500.000 | 500.000 |
| | | J u m l a h | - | 1.700.000 | 1.700.000 |

Sumber data : Kantor Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono tahun anggaran 1985/1986 - 1990 / 1991.

Dengan melihat tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelita keempat sampai dengan Pelita kelima tahun pertama khususnya Kecamatan Binamu berhasil melaksanakan

Kader Pembangunan Desa (KPD), Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

B.2 Pembangunan Ekonomi Pedesaan.

Pembangunan ekonomi menjadi titik berat pembangunan jangka panjang oleh karena dengan peningkatan hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi itu akan tersedia sumber-sumber biaya pembangunan (Inpres Bantuan) bagi peningkatan pembangunan.

Kalau melihat tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan masih mengalami kekurangan dan keterbatasan khususnya desa-desa yang ada di Kecamatan Binamu. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena keterbatasannya tenaga kerja produktif yang mempunyai keterampilan dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di pedesaan, serta kurangnya permodalan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pedesaan dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

Untuk mengatasi masalah-masalah diatas, perlu terus ditingkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan dengan cara menumbuhkembangkan Usaha ekonomi Desa (UED) serta praktek kerja lapangan dengan bantuan dana dari Inpres Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) dalam Pembangunan Desa.

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari UEB menurut Petunjuk Pelaksanaan BP2M dalam Pembangunan Desa adalah :
Maksudnya dalam petunjuk adalah :

- a. "Semua usaha-usaha ekonomi yang diusahakan oleh desa dan atau masyarakat desa secara perorangan ataupun kelompok, yang modalnya bersumber baik dari Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan atau bantuan lainnya dari Pemerintah maupun dari Swadaya masyarakat itu sendiri.
- b. Usaha Ekonomi Desa tersebut di atas dikelola secara perusahaan dengan berdasarkan azas kekeluargaan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi sumber kemakmuran masyarakat desa.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha ekonomi pedesaan kearah kehidupan berkoperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan agar mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, melalui latihan-latihan keterampilan bagi masyarakat pedesaan untuk memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil produksinya yang sekaligus diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja di pedesaan.

Adapun maksud dari menumbuhkembangkan UED adalah usaha untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan yang

bersifat ekonomis produktif di pedesaan dengan dana dari BP2M dalam pembangunan desa melalui :

- a. Pelatihan Praktek Kerja Lapangan (PPKL), dan
- b. Bimbingan UED dengan Sistem Dana Bantuan Modal Usaha Bergulir (SDBMUD).

Sedangkan yang dimaksud dengan PPKL adalah suatu pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi warga desa/kelurahan dengan cara langsung ikut bekerja dan berlatih (magang) pada suatu kegiatan usaha ekonomi produktifitas terutama yang sedang berjalan dengan biaya dari dana BP2M dalam pembangunan Desa.

Adapun Bimbingan UED dengan Sistem Dana Bantuan Modal Usaha Bergulir (SDBMUD) adalah menumbuhkembangkan UED dengan memberikan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana BP2M melalui Latihan Praktek Kerja Lapangan (PPKL) kepada warga masyarakat (kelompok/pelaksanaan UED) yang mempunyai kemampuan berwiraswasta dengan kewajiban untuk mengembangkan dana bantuan tersebut kepada warga masyarakat (kelompok/pelaksana UED) lainnya.

Untuk lebih jelasnya penggunaan BP2M dalam pembangunan desa untuk menumbuhkan UED secara praktek kerja lapangan, di Wilayah Kecamatan Binamu dapat dilihat pada tabel 11.

B.3 Organisasi Desa dan Pemerintahan Desa yang Dinamis.

Organisasi yang penulis maksud disini adalah LKMD dan LMD yang berfungsi sebagai penampung segala aspirasi yang timbul dari kalangan masyarakat sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa/Kelurahan itu sendiri beserta stafnya.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa secara formal kedua lembaga tersebut telah terbentuk pada semua desa dan kelurahan dan dapat bergerak di semua Desa/ Kelurahan di Kecamatan Binamu.

Dengan terpenuhinya kedua Lembaga tersebut di atas berarti lengkaplah aparat yang duduk dalam pemerintahan desa dalam memainkan peranannya sebagai perencanaan pengawas pembangunan melalui suatu musyawarah permufakatan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam hubungannya dengan Kepala Desa/Kelapa Kelurahan adalah dapat menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari atas. Dan dapat membantu dan menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan Desa/Kelurahan.

Keadaan seperti di atas sudah nampak di Wilayah Kecamatan Binamu, berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa responden, menunjukkan bahwa LKMD dan LMD sudah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 12

Tanggapan responden terhadap LKMD dalam memainkan peranan dalam Pembangunan Desa

| Sampel Desa/Kelurahan | Musyawarah/pertemuan | | | Total |
|--------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| | Selalu | Jarang | Tdk pernah | |
| | F % | F % | F % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Empoang | 11 28,0 | 2 5,0 | - 0,0 | 13 33,3 |
| - Bontomatene | 9 23,0 | 4 10,0 | - 0,0 | 13 33,3 |
| - Mangepong | 8 21,0 | 5 13,0 | - 0,0 | 13 33,3 |
| Total | 28 72,0 | 11 28,0 | - 0,0 | 39 100,0 |

Sumber Data : Hasil wawancara responden 15 s/d 30 Desember 1990

Dari daftar olahan tersebut menunjukkan bahwa 28 (72,0 %) responden menyatakan berfungsi, yang menyatakan kurang berfungsi 11 (28,0 %) dan yang menyatakan tidak berfungsi (0,0 %).

B.4 Fungsi Kepemimpinan yang terbuka.

Dalam kehidupan secara bersama-sama baik dalam kehidupan bersama dengan masyarakat maupun dengan keluarga selalu membutuhkan kepemimpinan. Pemimpin merupakan faktor penentu dalam suksesnya atau gagalnya suatu organisasi atau usaha, dalam semua aspek kehidupan, disitulah dibutuhkan kepemimpinan dan pemimpin untuk mengefesiesikan setiap lembaga atau kegiatan yang berarti.

Untuk mengarahkan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin dan Kepemimpinan, baiklah berikut ini akan dikemukakan definisi mengenai Pemimpin dan Kepemimpinan.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Dra.Kartini Kartono dalam bukunya "Pemimpin dan Kepemimpinan" mengatakan sebagai berikut :

"Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu". (Kartini : 1982, 35)

Sedangkan Kepemimpinan menurut Prof. Kimbal Young dalam buku yang sama diatas, adalah :

"Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang di dasari atau kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompok, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus". (hal : 40).

Dari pengertian tersebut di atas akan nampak terlebih adanya beberapa unsur terpenting atau ide pokok :

- a. Pribadi yang memiliki kecakapan khusus;
- b. Sanggup mempengaruhi dan mendorong orang lain;
- c. Dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Sedangkan Fungsi Kepemimpinan ialah : memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengendalikan organisasi menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Jadi faktor kepemimpinan sangat berperan dalam upaya menggali dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Demikian pula halnya keberhasilan pelaksanaan proyek bantuan desa ditentukan adanya kepemimpinan Kepala Desa yang benar-benar melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak pada tahap perencanaan tingkat desa, semua potensi turut dilibatkan, dimana anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan-usulan demi tercapainya kata sepakat.

Jadi faktor keterbukaan Kepala desa, sangat diperlukan dikalangan masyarakat, namun kenyataan

ditemukan oleh penulis di lapangan khususnya di tiga sampel tersebut, dalam pelaksanaan proyek bantuan desa di Wilayah Kecamatan Binamu berjalan sebagaimana yang diharapkan, tetapi yang menjadi hambatan di sini adalah terjadinya saling curiga-mencurigai antara kepala Desa dengan masyarakat khususnya dalam penerimaan keuangan.

Untuk memperjelas uraian di atas, responden dari dua desa atau satu Kelurahan sampel memberikan datanya seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL 13

Tanggapan Responden terhadap sikap
Ketertutupan Kepala Desa Kepada Masyarakat
dalam Penerimaan keuangan Bantuan Desa

| Sampel Desa/Kelurahan | Ketertutupan Kepala. Desa | | Total |
|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | Tertutup | Idk tertutup | |
| | F % | F % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Empoang | 9 23,0 | 4 10,0 | 13 33,0 |
| - Rontomate'ne | 8 21,0 | 5 12,0 | 13 33,0 |
| - Mangepong | 10 26,0 | 3 8,0 | 13 33,0 |
| Total | 27 | 12 | 39 |
| % | 70,0 | 30,0 | 100,0 |

Sumber data : Hasil Wawancara responden 15 s/d 30 Desember 1990

Tabel di atas menunjukkan bahwa 27 (70,0 %) responden menyatakan terbuka, sedangkan 12 (30,0 %) menyatakan tidak terbuka dalam penerimaan keuangan.

Akibat ketertutupan Kepala desa khususnya dalam penerimaan keuangan, maka masyarakat beranggapan bahwa keuangan bantuan desa cukup untuk membiayai proyek yang telah ditetapkan sebagaimana rencana semula.

Demikian pula halnya dengan kedudukan Kepala Desa selaku pemimpin proyek senantiasa mendapat sorotan dari masyarakat, dianggap telah menggunakan keuangan Bantuan Desa untuk kepentingan pribadinya. Walaupun sesungguhnya Kepala Desa tersebut tidak berbuat seperti apa yang dimaksud sebagian masyarakat Desa.

Adanya kontradiksi pendapat antara pemimpin proyek (Kepala Desa) dan masyarakat yang mengakibatkan dampak negatif yang semakin melemahnya gairah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Proyek Bantuan Desa.

Dan untuk menghindari hal tersebut dalam hal penerimaan, maka Kepala Desa harus terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi saling curiga-mencurigai, yang akhirnya membuat masyarakat akan lebih jauh dari kegiatan pembangunan.

Kepala desa yang bertanggung jawab dan jujur

harus mengumumkan berapa besar bantuan, desa yang sebenarnya diterima, agar dengan sendirinya masyarakat mengetahui lalu mereka dengan spontan memberikan bantuan, baik berupa tenaga maupun materil dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk pembangunan proyek.

B.5 Keikutsertaan masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Masalah keikutsertaan (partisipasi) dalam pembangunan desa, dapat ditinjau dari perilaku atau sikap seorang Pemimpin dan yang dipimpin, bilamana keduanya berintraksi maka partisipasi akan nyata kelihatan.

Untuk mengetahui tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dapat diukur dari Proyek swadaya murni dan keterlibatan LKMD dalam proses perumusan kebijaksanaan.

Untuk lebih jelasnya tingkat partisipasi di Kecamatan Binamu dapat dilihat pada pembahasan di atas.

C. Realisasi Program Bantuan Pembangunan Desa di Wilayah

Kecamatan Binamu.

Gambaran keadaan pembiayaan pembangunan selama Pelita keempat dan Pelita kelima tahun pertama dapat

memberi petunjuk kedudukan dan peranannya dalam setiap bentuk sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dan proses penyebaran dana tersebut telah tersedia dan diperuntukkan bagi program Inpres kepada setiap macam program berdasarkan kriteria tertentu misalnya dengan menetapkan skala prioritas.

Pelaksanaan bantuan pembangunan desa, khusus Pelita kelima tahun pertama di Wilayah Kecamatan Binamu menunjukkan angka prosentase yang tidak berimbang antara realisasi dana proyek berdasarkan DURP bantuan pembangunan desa dengan realisasi fisik proyek dilapangan. jika dibandingkan dengan realisasi proyek baik fisik maupun non fisik rata-rata hanya 50 - 60 % . Penjelasn di atas berdasarkan data-data dan hasil wawancara dengan Kepala Bangdes.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa menyatakan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan pembangunan proyek-proyek yang di prioritaskan oleh masyarakat desa yang tercermin dari masing-masing seksi Lembaga Ketahanan Masyarakat desa (LKMD) dan kegiatan lainnya yang mendukung pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran secara global realisasi INPRES Bantuan Pembangunan Desa di kecamatan Binamu sejak Pelita keempat sampai Pelita kelima tahun pertama. Dapat

di lihat pada tabel 9 dan 11. (hal 53 dan 59)

Kembali kepada sumber pembiayaan proyek dana dari Pusat bila dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari swadaya masyarakat boleh dikatakan masih kurang. Hal ini merupakan pertanda bahwa nilai-nilai sosial masih sedikit pada masyarakat pedalaman.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa responden, yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat masih kurang disebabkan oleh karena kurangnya keterbukaan pemerintah setempat dalam penerimaan keuangan. Dan penyebab lain adalah adanya pengwilayahan komoditas khususnya pada pelita keempat yang sudah lewat Inpres Bantuan Pembangunan Desa, rata-rata dana tersebut diprioritaskan untuk pembelian bibit Pertanian khusus bibit Mangga Akolasi dan Kelapa Hiprida yang merupakan Program Daerah Tingkat II Kabupaten Jeneponto.

Sedangkan Pelita kelima tahun pertama (1990/1991) menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dengan melihat dana swadaya masyarakat sudah boleh dikatakan cukup tinggi. Hal ini merupakan pertanda bahwa keterbukaan Kepala Desa sudah mulai ada dan Program yang diusulkan Kepala desa ke Kecamatan sudah di terima.

B A B V

P E N U T U P

Setelah pembahasan bab demi bab telah dilalui maka tibalah pada bab terakhir yakni bab penutup rangkaian penulisan. Bab ini dibagi atas dua bagian yaitu kesimpulan dan saran-saran. Bertolak dari hasil analisa maka dapat ditarik suatu kesimpulan daripada pembahasan analisa tersebut.

A. KESIMPULAN.

1. Sasaran Pembangunan Nasional tertuju kepada Pembangunan desa, karena sebagian besar masyarakat Indonesia berdiam di pedesaan itu masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Dengan hadirnya kebijaksanaan pemerintah melalui program Inpres Bantuan Desa khususnya di Wilayah Kecamatan Binamu sedikit banyaknya telah membawa sejumlah perubahan dalam berbagai bentuk kegiatan dalam kehidupan masyarakat pedesaan terutama adanya beberapa proyek desa seperti Balai Desa, jalan, jembatan desa, sekolah, mesjid dan sebagainya.
3. Adapun tujuan dan kegunaan daripada Inpres Bandes tersebut adalah untuk mendorong dan menggerakkan usaha swadaya gotong-royong, yang masih berurat dan berakar dalam pola kehidupan mereka sehari-hari dalam membangun proyek-proyek yang diprioritaskan oleh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

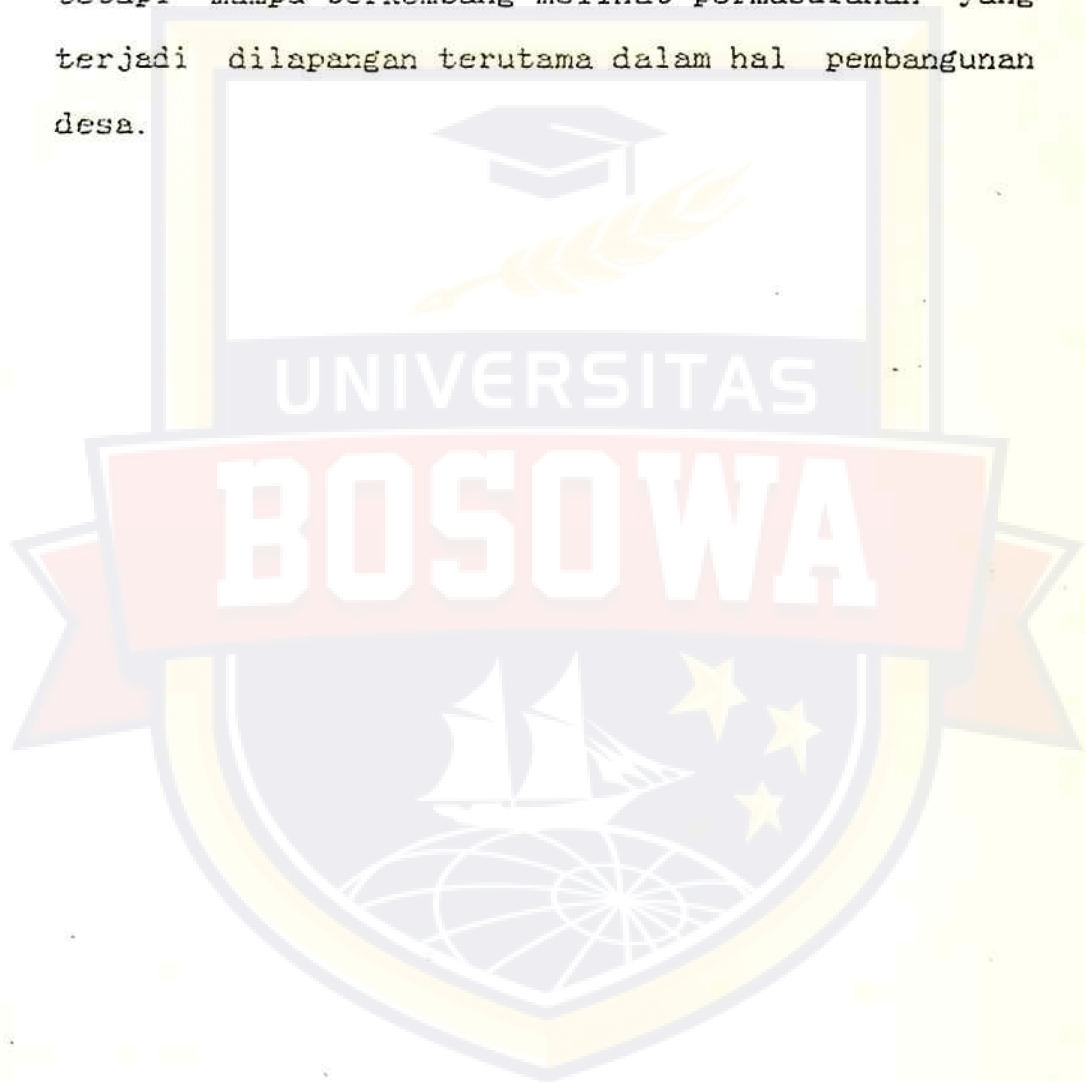
4. Dengan melihat tabel 9 sudah nampak dengan adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh Inpres Bantuan Desa melalui swadaya masyarakat sedangkan menurut beberapa responden menyatakan bahwa Inpres tersebut membawa pengaruh/terpengaruh dalam kegiatan pembangunan desa.
5. Ada beberapa faktor strategi yang turut diperhatikan dalam hal pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa.
 - a. Faktor pendidikan terhadap kader-kader pembangunan desa.
 - b. Faktor ekonomi pedesaan
 - c. Faktor organisasi desa yang dinamis
 - d. Faktor kepemimpinan yang terbuka
 - e. Faktor kesediaan mengabdikan diri bagi setiap warga desa
6. Dari kelima faktor tersebut di atas sudah nampak bila dikaitkan dengan Inpres Bandes melalui BP2M (Bantuan Peningkatan Peran serta masyarakat) yang berisi dengan (KPD) Kader Pembangunan Desa, (UED) Usaha Ekonomi Desa, (UDKP) Unit Daerah Kerja Pembangunan.
7. Adapun faktor penghambat terjadinya partisipasi yang makin tahun makin menurun disebabkan oleh karena kurangnya keterbukaan Kepala Desa dalam hal keuangan dan terjadinya pengwilayahan komoditas.

8. Sedangkan realisasi Program Bantuan Desa menunjukkan angka prosentase yang tidak berimbang antara realisasi proyek berdasarkan DURP dengan realisasi fisik proyek dilapangan, ini berlaku hanya pada pelita kelima tahun pertama sedangkan Pelita keempat realisasi proyek dana dilapangan 100% .

B. SARAN-SARAN.

1. Untuk membangkitkan partisipasi diperlukan adanya pembinaan terhadap kader-kader pembangunan di desa dan menghindari adanya saling curiga-mencurigai antara Kepala Desa dengan masyarakat.
2. Untuk mengatasi kepincangan antara Kepala Desa dengan Masyarakat diperlukan adanya keterbukaan khususnya dalam penerimaan keuangan dan ini dilakukan dalam musyawarah LKMD dan pemanfaatan dapat terbukti di lapangan.
3. Penulis mengharapkan agar supaya dana bantuan pembangunan desa tidak secara langsung dipegang oleh kepala desa melainkan menfungsikan jabatan Bendaharawan proyek, ini dilakukan untuk menghindari segala kemungkinan yang akan terjadi.

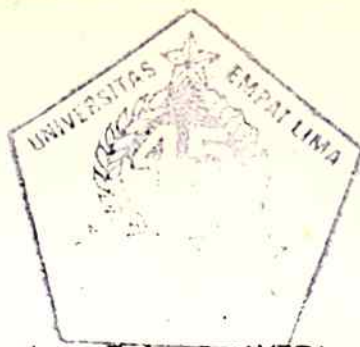
4. Untuk dapat meningkatkan fungsi LKMD yang merupakan wadah partisipasi masyarakat desa, tidak hanya terbatas pada perencanaan proyek bantuan desa, akan tetapi mampu berkembang melihat permasalahan yang terjadi dilapangan terutama dalam hal pembangunan desa.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku - Buku

1. Bintoro R, Penuntun Geografi Sosial, Penerbit Yokya-karta, UP, SPOING, 1968.
2. Kartohadikoesoemo Soetarjo, Desa, Penerbit Samur Ban-dung 1979
3. Kartono kartini Dra, Pemimpin dan Kepemimpinan, Penerbit CV Rajawali, Jakarta 1982.
4. Koentjaraningrat, Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan, Penerbit PT Gramedia Jakarta 1974.
5. Siagian S.P. Dr. Prof. Ph,d. Administrasi Pembangunan Penerbit CV Haji Masagung, Jakarta 1981.
6. Singarimbun Masri dan Affendi Sofian, Metode Peneliti-an Survei, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1981.
7. Surjadi A. Drs. MA. Ph,d. Pembangunan Masyarakat Desa, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 1989.
8. Thala H. M. Drs, Pembangunan Masyarakat Desa dan Daerah Pedesaan di Indonesia, Penerbit, STKIP Muhammadiyah, Enrekang, 1988.
9. Tjokroamidjojo Bintoro, Pengantar Administrasi Pembangunan, Penerbit LP3ES, Jakarta 1985.
10. Turung J, Administrasi Pembangunan, Penerbit Yayasan FIP IKIP Manado 1980.



Dokumen - Dokumen

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II tahun 1983, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Departemen Penerangan, Jakarta 1983
2. Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor VI tahun 1984, tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kepada Propensi daerah Tingkat II, dan Desa. Dirjen Bangdes dan Depdagri 1984.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 tentang, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa, Dirjen Bangdes, Jakarta 1984.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.4/1233 Bangdes, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Peran serta Masyarakat (BP2M) Dalam Pembangunan Desa Dalam rangka menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Desa (UED) secara praktek Kerja Lapangan Tahun Anggaran 1990/1991, terbitan Dirjen Bangdes 1990.
5. Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa terbitan Dirjen Bangdes Tahun 1990/1991 dari hasil Musyawarah Para Bupati/Walikota/madya se Indonesia di Bogor Jawa Barat.
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1984, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.
9. Pokok-pokok pembangunan Desa, Terbitan Dirjen Bangdes 1974.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 319 tahun 1988, tentang Pembangunan Lima Tahun (pelita I)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 1984, tentang Pola Organisasi pemerintahan di Wilayah kecamatan, terbitan departemen dalam Negeri 1984.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 1984, tentang Pola Organisasi pemerintahan dan Tata kerja struktur Wilayah Kecamatan.

